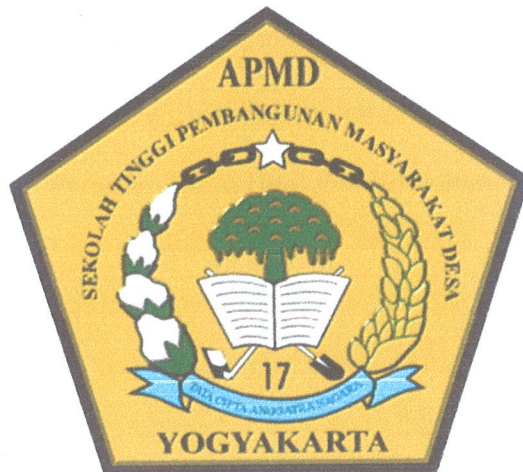


**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN  
DESA WISATA**

*(Studi Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat  
Nusatenggara Timur)*



**DI SUSUN OLEH**

**JEKSON JEWU GARRA  
21520039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2025**



**HALAMAN JUDUL**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA  
WISATA DI DESA WATUKARERE**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

**Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si**  
Ketua Penguji/Pembimbing

**Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si**  
Penguji Sampung I

**Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum**  
Penguji Sampung II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
**Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jekson Jewu Garra

NIM : 21520039

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA WATUKARERE”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025



Jekson Jewu Garra  
21520039

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jekson Jewu Garra  
NIM : 21520039  
Telp : 081287538867  
Email : Jeksongarra99@gmail.com

Program Studi: Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA  
WISATA DI DESA WATUKARERE”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan

  
Jekson Jewu Garra  
21520039

## MOTTO

*“Aku dapat melakukan segala sesuatu didalam dia yang memberi kekuatan kepadaku”*

*(Filipi 4:13)*

*“Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sebarkan kebaikan dan cinta kasih di setiap langkahmu”*

*“Jangan biarkan rintangan menghentikan langkahmu, jadikan itu motivasi untuk terus maju. Karena di setiap langkah kecilmu adalah kemajuanmu menuju kesuksesan”*

*“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi”*  
*(Yosua 1:9)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha esa. Atas berkat dan karunianya serta hikmat kehidupan yang tidak berkesudahan dalam hidup saya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, dan semoga dapat bermanfaat bagi diri saya hingga orang banyak untuk terus berjuang dan berkarya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Agustinus Kedu Ngurra dan Ibu Theodora B. Tara. Terimakasih atas segala dukungan, motifasi, didikan, perjuangan, dan Doa yang tidak pernah dilupakan untuk anak-anaknya yang menempuh pendidikan terlebih khususnya saya, saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih bapa mama suda mendidik, merawat, dan melahirkan saya didunia ini.
2. Kepada kedua orang tua angkat/Bapak besar dan Mama Besar saya, Bapak Jhon Lado Bora Kabba dan almarhum Ibu Naomi Weru Radi Kaka. Terimakasih atas segala dukungan, didikan, motifasi, serta doanya yang tidak berkesudahan dalam hidup saya sehingga sampai saat ini saya bisa membuktikan bahwa saya bisa mencapai tujuan dan cita-cita saya.
3. Saudara saya, Maria Meti Dunga, Ester Lelu Laka, almarhum adik Marten Mete Bulu. Terimakasih kalaina telah menjadi sodara dan adik-adik saya yang paling saya sayangi kalian semua dan terimakasih juga atas dukungan

dan doanya yang kalian panjatkan kepda saya sehingga saya sampai pada titik ini atas berkat dan karunia tuhan.

4. Saudara saya, Odelia Selati Kabba, Ayuningsi Anna Kabba, Florensia Arnesta Kabba, Serilius Mati Kabba, bungsu Riski Kabba. Terimakasih atas dukungan, perhatian/motifasi, serta Doanya yang tidak berkesudahan dalam masa perjuangan kuliah saya, kalian semua adalah sodara saya serasa kandung yang sangat saya sayangi, atas dukungan penu kasi sayng kalian semua sehingga saya boleh sampai pada titik ini.
5. Nona Eviana Magy Zudi yang special dalam hidup saya. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, motifasi, serta Doanya yang masi berlanjut sampai saat ini.
6. Keluarga Besar Suku Gaura terlebih kususny Umma A najara, terimakasih atas dukungan, motifasi yang telah kalian berikan dalam hidup saya serta hal-hal lainnya yang dapat bermanfaat dan saya kagumi.
7. Rumah intelektual kader marhaenis yang dimana tempat saya berdinamika dengan motonya “pejuang pemikir-pemikir pejuang” yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), khususnya dewan pengurus komisariat GMNI APMD Yogyakarta. Bung dan Sarinah yang saya bangga muliakan, bung Arif Soru, bung James Roberto, bung Markus Dasmase, bung Jozerisal, bung Ama, bung Je, bung Rinus, bung Sandi, bung Ancik, bung Yepsi, bung Lensa, bung Alex Kabba, bung Ferdi Wawo, bung Angga, bung Ferdi, bung Simson, bung Osep, bung Sultan Alor, sarinah Aulia, sarinah Ari, sarinah Widia, sarinah Lea, sarinah Reta, sarinah Sriayu,



sarinah Diana, sarinah Mumun, sarinah Rikka, sarinah Tikka, sarinah Lala, sarinah Maya, sarinah Itin, bung Erlan, serta bung dan sarinah komisariat GMNI APMD yang belum sempat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas dinamika dan ruang belajarnya selama ini yang kita lalui bersama-sama, tentu apa yang saya dapatkan dalam ruang intelektual ini semoga menjadi dasar/pedoman dalam hidup saya dan semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi serta mampu mempraktekkan nilai-nilai soekarno dalam bermasyarakat maupun dalam mengambil tindakan dalam memperjuangkan yang menjadi hak miliknya. Merdeka, GMNI...Jaya, Marhaen...Menang.

8. Rumah atau keluarga Laboya Jogja Family yang dimana adalah sebuah komonitas anak Sumba Barat terlebih khususnya Kecamatan Lamboya dan Lamboya Barat, yang didalamnya mengajarkan untuk selalu bersatu, saling mengasih/menolong, serta selalu menerapkan nilai-nilai adat dan budaya dalam keluarga ditanah rauntauan Yogyakarta. Kaka Mau Baru, kaka Obet, Darius, Abry Nunu, Yosep Maga, Noldi Hoga, Yadi Kaleka, Alex Kabba, Ferdy Wawo, Okta Pake, Herman, Rian, Yanto Lere, Paul, Maxi, Gaby, Nando, Timo Kahale, Ardy Kula, Yonoris Paila, Obet Daro, dan sodara perempuan Berkatini Kaboka, Aply Kalowo, Rhasty Maga, Helmy, Orpa, Titin, Artha, Chelin, Ambu Maudeng, Apli Bungsu, Enjel, serta sodara-sodari yang belum sempat saya sebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, didikasi, serta doanya sampai saat ini sehingga saya bole berada dititik ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan syukur kehadapan hadirat kepada Allah bapa yang maha kuasa atas berkat dan karunianya yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan Skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA WATUKARERE”**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan, M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing, yang suda bersedia membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir baik dorongan pemikiran, pengetahuan dan ide atau gagasan yang didapatkan untuk mendukung selesainya Skripsi tersebut.

5. Bapak/Ibu Dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang suda bersedia meluangkan waktu melayani dan mendidik selama penulis menimbang ilmu di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang telah bersedia membantu dan mempermudah saya dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh Narasumber dan Masyarakat Desa Watukarere yang menjadi narasumber serta Dusun 1 Watukarere yang suda membantu dan mempermudah untuk menggali dan memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Agustinus Kedu Ngurra dan Ibu Theodora B. Tara serta Bapak dan Ibu sodara/angkat saya Bapak Jhon Lado Bora Kabba dan almarhum Ibu Naomi Weru Radi Kakka yang selalu memberikan dukungan, doa, serta nasihat untuk menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masi banyak terdapat kekurangan, baik dalam isi maupun teknik penyajian. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaiki dan penelitian selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik itu akademisi, praktisi, dan seluruh elemen masyarakat desa watukarere dan Indonesia.

Yogyakarta, 5 Aguatus 2025

  
Jekson Jewu Garra  
21520039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat akademis .....	7
2. Manfaat praktis .....	7
E. Literature Reviw .....	8
F. Kerangka Konseptual.....	12
1. Strategi .....	12
2. Pemerintah .....	13
3. Pemerintah Desa .....	15
4. Pengembangan Wisata .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Unit analisis.....	20

3. Teknik pengumpulan data .....	22
4. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB II PROFIL DESA WISATA WATUKARERE, KECAMATAN LAMBOYA, KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR.....</b>	<b>29</b>
A. Desa Wisata Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat	29
B. Sejarah Desa Watukarere.....	43
C. Kondisi Sosial Dan Budaya Desa Watukarere .....	45
D. Kondisi Geografis .....	51
E. Kondisi Ekonomi Desa Watukarere .....	52
F. Kondisi Infrastruktur/Sarana-Prasarana Desa Watukarere .....	52
G. Pemerintahan Desa Watukarere.....	53
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN STRATEGI PEMERINTAH DESA WATUKARERE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA WATUKARERE .....</b>	<b>59</b>
A. Perencanaan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Watukarere.....	59
B. Cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere.....	69
C. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere.....	76
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Profil Subjek Penelitian .....	22
Tabel 2. 1 Susunan pengurus sementara kampung pariwisata Desa Watukarere .	30
Tabel 2. 2 Struktur pengurus tenun ikat karaja laboya.....	31
Tabel 2. 3 Adapun para kepala Desa yang memimpin Desa Watu Karere .....	44
Tabel 2. 4 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan .....	47
Tabel 2. 5 Berdasarkan mata pencaharian.....	48
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama .....	51
Tabel 2. 7 Sarana dan prasarana desa watukarere.....	53
Tabel 2. 8 Jumlah Pengunjung di Kampung Pariwisata di Desa Watukarere.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kegiatan budaya mencari ikan dimuara .....	42
Gambar 2. 2	Budaya kedde bawa hewan .....	42
Gambar 2. 3	Budaya nonton topeng .....	43
Gambar 2. 4	Budaya pasola.....	44
Gambar 2. 5	Kampung situs watukarere .....	33
Gambar 2. 6	Kegiatan tenun ikat ibu-ibu .....	33
Gambar 2. 7	Kunjungan ibu menteri pariwisata .....	34
Gambar 2. 8	Kegiatan percobaan penenun kain.....	35
Gambar 2. 9	Proses pembuatan WC/Toilet umum.....	35
Gambar 2. 10	Proses pembuatan WC/Toilet umum.....	36
Gambar 2. 11	Proses pembuatan kain tenun/sarung.....	36
Gambar 2. 12	Prosess guling benang .....	37
Gambar 2. 13	Hasil dari pengolahan kain sarung .....	37
Gambar 2. 14	Awal pembukaan program pengolaan kampung Wisata dan Tenun Ikat yang pimpin oleh kepala Desa Watukarere .....	38
Gambar 2. 15	Tahap percobaan dan promosi kain tenunnya .....	38
Gambar 2. 16	Proses percobaan ibu menteri pariwisata untuk penggulangan benang.....	38
Gambar 2. 17	Proses penggulangan benang ibu-ibu tenun ikat karaja .....	39

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Desa Watukarere.....	56
-----------------------------------------------------	----



## INTISARI

Skripsi ini membahas tentang strategi pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere, yang merupakan salah satu program strategis yang dimiliki desa watukarere. Seharusnya, potensi wisata yang ada dikembangkan oleh pemerintah desa. Namun kenyataannya hal ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, dalam proses pengembangan desa wisata atau kampung pariwisata, pemerintah desa kurang konsisten dalam memberikan dukungan terhadap program yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan tindakan pemerintah desa, padahal seharusnya pemerintah desa memiliki peran utama dalam mengembangkan potensi kampung pariwisata tersebut. Sehingga kemudian peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa Yayasan EGK (English Go to Kampung) yang terlibat langsung dalam kerja Sama pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada yaitu, kampung pariwisata. Masyarakat pun menyetujui dan menerima tawaran dari yayasan EGK, sehingga program pengelolaan dan pengembangan kampung pariwisata dapat berjalan dan terus berlangsung hingga saat ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Governing untuk mendalami dan menggali objek penelitian sehingga dapat menemukan masalah, potensi, dan hipotesis dalam penelitian terkait, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Kemudian langkah-langkah dalam teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data (data reduction) yang bertujuan untuk dirangkum oleh penulis sehingga dapat dipilah, dan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, kemudian penyajian data (data display) yang bertujuan agar informasi mudah dipahami dan dapat dikaitkan hingga dalam penyajian data menggunakan teks naratif untuk memudahkan pengambilan keputusan yang tepat, lalu yang kemudian penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memverifikasi data, cara menemukan makna, mengidentifikasi pola keteraturan, serta hubungan sebab-akibat sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik secara tepat dan sistematis.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perencanaan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Dalam perencanaannya, pemerintah mempunyai konsep strategis dalam pengembangan Desa Wisata sehingga programnya terstruktur dan sesuai yang telah dijalankan oleh masyarakat, sehingga dalam penilaian potensi wisata yang terdapat di Desa Watukarere, pemerintah dapat mengoptimalkan pengembangan potensi tersebut. Pada tahap ini, pemerintah desa mengkaji berbagai aspek seperti sumber daya alam, budaya, dan fasilitas infrastruktur yang berperan dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Cara pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata tentu metode yang harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam

mengembangkan desa wisata yaitu pembentukan Tim pengelola khusus kampung wariwisata, penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata, serta menjalin kerja Sama dengan berbagai pihak seperti yayasan, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis wisata. Kemudian pemerintah desa juga melakukan promosi desa wisata/kampung pariwisata melalui media sosial dan acara-acara lokal. Sehingga pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif sangat penting agar pengembangan desa wisata dapat berlangsung dengan efektif dan berkelanjutan. Tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung wisata seperti jalan akses, area parkir, dan sarana informasi, pengelolaan tata kelola wisata, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pengembangan produk lokal seperti tenun ikat karaja laboya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui sektor pariwisata. Dalam beberapa situasi, tindakan ini juga mencakup kerja Sama dengan lembaga luar, seperti Yayasan EGK, untuk memperkuat pengembangan kampung pariwisata, melalui lembaga kelompok Pengelola Kampung Pariwisata dan Tenun Ikat Karaja Laboya.

**Kata Kunci:** Strategi, Pemerintah Desa, Pengembangan, Desa Wisata.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan. Sektor pariwisata menjanjikan berbagai manfaat bagi banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku swasta. Hal ini karena pariwisata dianggap sebagai sektor yang menguntungkan dan dapat dijadikan aset penting serta sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi Wisata. Pemerintah Desa, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa, harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dalam proses pembentukan pemerintahan. Prinsip ini menjadi dasar agar pemerintah Desa dapat menjalankan tujuan, aturan, dan prinsip pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sejati. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintah Desa memiliki tanggung jawab yang tinggi dan beroperasi di bawah naungan pemerintahan tingkat Kabupaten.

Desa memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang pariwisata. Pengaturan, pengelolaan, serta pelaksanaan program pariwisata di tingkat Desa didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diruba terakhir kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa wajib dan berhak mengatur serta mengelola wilayahnya sendiri, termasuk mengelola tata pemerintahan Desa sesuai dengan hak asal-usul yang dimiliki. Secara prinsip, hak otonomi Desa diberikan oleh pemerintah kabupaten atau Kota berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Sumba Barat. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Desa ini mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola wilayahnya sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diruba terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait Desa, termasuk pelaksanaan otonomi Desa, pengelolaan pemerintahan Desa, dan pembangunan Desa. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kedudukan dan tipe Desa, kewenangan Desa, pelaksanaan pemerintahan, hak dan kewajiban Desa serta masyarakat, serta pengelolaan keuangan Desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa Watukarere perlu merumuskan strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya menstabilkan ekonomi masyarakat setempat. Di sisi lain, pemerintah Desa Watukarere juga bertugas menciptakan peluang kerja bagi warganya sendiri.

Strategi adalah salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki oleh pemerintah Desa dalam menyusun program guna untuk melancarkan sebuah kinerja, dalam hal Pengembangan Desa Wisata, pemerintah Desa

tidak hanya berfokus pada peningkatan daya tarik destinasi Wisata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal serta pelestarian Alam dan Budaya. Dalam konteks Desa Wisata, strategi pengembangan melibatkan pengelolaan sumber daya lokal berbasis komunitas, promosi yang efektif, Kerjasama dan sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta pihak swasta. Perkembangan Desa Wisata diIndonesia mendapat dorongan kuat dari program pemerintah yang mendorong peningkatan pengembangan serta penataan Wisata yang strategis yang memiliki daya tarik serta persaingan yang berbasis potensi lokal dalam pengelolaannya.

Desa Wisata membutuhkan strategi yang terstruktur untuk menjawab tantangan pengembangan destinasi Wisata berkelanjutan sehingga bertujuan untuk merumuskan prioritas pengembangan Desa Wisata. Sehingga dalam kinerja pemerintah Desa memiliki dasar untuk memfasilitasi masyarakat lewat Wisata yang ada atau potensi yang dimiliki oleh Desa setempat baik itu pemerintah, lembaga, dan bahkan masyarakat agar sama-sama merasakan dalam hal pemberdayaan, agar hal tersebut tercapai pemerintah Desa perlu menetapkan kebijakan yang baik. Ini merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa Wisata secara baik, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang tergolong sebagai Desa Wisata, maka skala prioritas pembangunan yang dilakukan berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata yang berpotensi lokal, dan peningkatan ekonomi mikro masyarakat setempat.

Dalam hal ini Desa Watukarere memiliki pontensi yang sangat luar biasa yakni Kampung Wisata (Kampung Watukarere) yang dimana yang mempunyai keindahan alam dan rumah adat yang menjulang tinggi (Rumah Menara) serta adat dan budayanya yang menjadi daya tarik orang lokal maupun wisatawan sehingga dari masyarakat setempat mempunyai inisiatif atau kesepakatan yang baik dan Yayasan Tenun Ikat Karaja Laboya untuk bekerja sama mengembangkan potensi yang ada serta mempromosikan kepada wisatawan manca Negara maupun lokal. Wisata tersebut yang dimiliki oleh Desa Watukarere sangat strategis selain dari rumah adatnya yang menjulang tinggi (Rumah Menara) karena spot wisatanya yang berada dekat pesisir pantai dan pemandangannya langsung meluas kepantai sehingga keindahan dari itu yang membuat para wisatawan ramai untuk berkunjung diKampung Watukarere hingga pada saat ini, sehingga kemudian ini yang bertujuan untuk kesesjahtraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata, dan masyarakat setempat bisa mempromosikan hasil kreatif lokal seperti, tenun ikat, adat, budaya, dan makanan khas lokanya.

Namun pemerintah Desa Watukarere tidak turut terlibat dalam program tersebut, karena dalam kapasitas pemerintah Desa dalam pengelolaan yang tidak memadai sehingga dalam hal pengembangan atau mensuplay program Wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat serta Yayasan Tenun Ikat untuk baimana dalam mengurus kelestarian Wisata atas tidak keterlibatan pemerintah setempat dikarenakan pemerintah setempat

hanya sekedar mengetahui program yang ada. Dalam hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab oleh pemerintah Desa setempat untuk bagaimana dikembangkan dalam segi keberlanjutan program yang dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah Desa harus merespon dengan baik dan turut ambil bagian melalui dukungan atau menganggarkan anggaran untuk penataan lebih lanjut. Yang dimana tugas utama pemerintah Desa sebagai kepala wilayah untuk mengurus, melindungi, melayani terhadap warga dan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Watukarere.

Namun sejauh ini dalam hasil pengamatan saya sebagai peneliti pemerintah Desa belum peka terhadap program yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam hal pengembangan Kampung Pariwisata di Kampung Watukarere. Desa Watukarere, yang dimana pemerintah Desa harus memanfaatkan potensi Wisata yang ada dan membangun fisik Wisatanya yang dibutuhkan. Melalui program bantuan pelayanan Kantor pos jaga, WC/toilet umum, tempat parkir, tempat sampah, kesediaan air bersih. Namun itu semua tidak ada yang dilakukan atau yang dibantu oleh pemerintah Desa setempat, segala kebutuhan sederhana yang dibutuhkan dipenuhi oleh masyarakat setempat melalui bekerjasama yang baik antara masyarakat dan Yayasan Tenun Ikat Karaja Laboya.

Dalam hal ini saya memakai perspektif 5G yakni Governing yang artinya perbuatan pemerintah, didalamnya termuat dua poin yang saya fokuskan yaitu strategi dan kebijakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata. Perspektif ini yang bisa menghubungkan dari

judul yang saya ambil yang dimana didalamnya meneliti tentang Strategi pemerintah Desa Watukarere dalam pengembangan Desa Wisata, yang berfokus pada penyusunan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung serta berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dan Yayasan Tenun Ikat Karja Laboya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan isu, konsep, dan strategi yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menetapkan batasan terkait objek atau fokus penelitian. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pemerintah Desa dalam strategi pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere
2. Cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere
3. Tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere



## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dengan merujuk pada rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam upaya pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Desa Watukarere, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam memperluas wawasan, terutama mengenai strategi pengembangan pariwisata, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Pemerintah Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta rekomendasi yang bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam merancang program kerja pengembangan Desa Wisata, sekaligus mendukung implementasi dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **b. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, informasi, dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Watukarere

terkait strategi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial mereka.

## **E. Literature Review**

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang pelaksanaan program wisata. Beberapa peneliti lain juga telah melakukan studi terkait strategi pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata, di antaranya:

1. Pertama, Amanda Wulan Apriliya Endang Indartuti, yang berjudul Strategi pemerintah Desa dalam pengembangan Desa wisata di Desa Hendrosari Kabupaten Gresik, praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 05, September (2022) e-ISSN: 2797-04692. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian berjenis kualitatif bertujuan untuk identifikasi permasalahan yang terdapat pada proyek inisiasi desa wisata Hendrosari. Desa Hendrosari yang terletak di Kecamatan Menganti memiliki potensi sumber daya alam yang bisa untuk dimanfaatkan atau dikembangkan. Desa Hendrosari mampu mewujudkan potensi desanya menjadi suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Desa Hendrosari yang berada di Kabupaten Gresik merupakan desa yang memiliki potensi alam berupa pohon siwalan (lontar), dari pohon inilah banyak masyarakat desa dapat menghidupi keluarganya. Salah satunya olahan dari pohon lontar ini yaitu minuman yang biasa dikenal dengan sebutan legen. Selain produk

olahan legen desa Hendrosari juga dikenal dengan sentra kuliner, karena banyak dijumpai warung atau rumah makan yang banyak menyediakan berbagai macam kuliner nusantara.

2. Kedua, Seri Hartati 1 Universitas Abdurrah, Indonesia, Muhammad Fajar Anugerah. Strategi pemerintah Desa dalam pengembangan potensi kampung wisata di Desa gunung malelo kecamatan koto Kampar hulu tahun 2020. IJI Publication p-ISSN: 2774-1907 e-ISSN: 2774-1915 Vol. 2, No. 2, pp. 54-61 Maret 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Desa Gunung Malelo memiliki delapan unggulan wisata (Product), seperti wisata religi, wahana air, wahana keluarga dan juga kuliner. Price (harga) wisata Gunung Malelo adalah wisata yang ramah lingkungan, mudah, murah dan nyaman. Place dalam strategi pemerintah terhadap peningkatan potensi perkembangan lokasi wisata Desa Gunung Malelo adalah dengan mengadakan sarana dan prasarana guna kemajuan wisata dalam pembenahan dan juga membangun solidaritas. Dan strategi (promotion) yang dilakukan oleh Desa Gunung Malelo dalam promosi menggunakan media cetak dan media sosial.
3. Ketiga, Yoseph Erbito<sup>1</sup>, Solikhin<sup>2</sup>, Yesika Ola<sup>3</sup>. Strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata cipta karya, Vol.2 No 3, 2024 Page 138 of 144. Peneliian menggunakan metode kualitaitf, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa

Pemerintah Desa Cipta Karya telah melaksanakan prinsip penyelenggaraan desa wisata. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa serius mengelola potensi yang ada di Desa Cipta Karya untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Masyarakat juga terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah desa yang menjadikan Desa Wisata Cipta Karya.

4. Keempat, Ristarnado Ristarnado<sup>1</sup>, Joko Settyoko, Harpinsyah Harpinsyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo. Strategi pemerintahan desa dalam mengembangkan pariwisata. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN : Vol 1, No 1, Juni 2019, pp. 40-51, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan adalah pengembangan obyek wisata pariwisata Telaga Biru di desa Tanjung Alam Kabupaten Merangin Kecamatan Jangkat Timur yang berfokus pada desa Tanjung Alam yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan penulis, akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas terkait dengan teori yang digunakan yaitu Dimensi Strategi menurut Henry Mintzberg, Joseph Lampel, James Brian Quinn, dan Sumantra Ghoshal (2003) dalam buku *The Strategy Process* yaitu: Tujuan, Kebijakan dan Program yang akan menghasilkan suatu strategi.

5. Kelima, Susantri Dewi, David Fero, Rusmauli Simbolon, Yulia Sitepu, dan Wolter Silalahi. (2025). Strategi pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Wisata Muntei, Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai sebagai daya tarik wisatawan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 65–74. e-ISSN: 2774-8987; p-ISSN: 1411-5077. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang sering digunakan dalam ilmu sosial, termasuk pendidikan. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Muntei, Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa kajian literature diatas untuk mengetahui gambaran dan lanjutan penelitian sebagai bahan pertimbangan oleh peneliti. Adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui identifikasi peroblematika yang terdapat pada ruang lingkup pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata. Sedangkan perbedaannya penelitian berbeda dengan penelitina terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan governing untuk mengetahui dan mendalami proses startegi oleh pemerintah desa seperti kebijakan, distribusi hasil ekonomi, dan koersif, kemudian perbedaan pada objek, lokasi penelitian serta dalam pembahasan atau penjelasannya yang sedikit berbeda namun tujuannya sama untuk mengetahui persoalan yang lebih jelas dan terperinci dalam pengembanagan desa wisata, namun pada hasil penelitian pasti berbeda.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Strategi**

Istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "strategos" yang terdiri dari "stratos" (militer) dan "ag" (memimpin), yang berarti kepemimpinan jenderal dalam merancang rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi diartikan sebagai metode atau Cara untuk mencapai suatu tujuan. Strategi melibatkan serangkaian aktivitas penting yang diperlukan demi tercapainya tujuan tersebut. Menurut Nawawi, secara etimologis penggunaan kata "strategik" dalam konteks manajemen organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang disusun secara sistematis dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi manajemen yang terarah dan adanya tujuan strategik organisasi.

Strategi adalah pendekatan yang mencakup gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang baik melibatkan koordinasi dan kerja samatim, memiliki tema yang mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam penggunaan Dana, serta metode yang efektif untuk mencapai tujuan. Menurut Akdon (2016), strategi dalam manajemen organisasi pada dasarnya merupakan rencana besar yang berorientasi jangka panjang dan dirancang sedemikian rupa agar organisasi dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam situasi persaingan, dengan tujuan utama mengoptimalkan pencapaian target dan

sasaran organisasi. Berdasarkan tinjauan ini, strategi organisasi dapat dijelaskan sebagai:

1. Alat yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan.
2. Seperangkat rencana yang disusun berdasarkan kajian mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.
3. Pola dinamis yang dijalankan sesuai dengan keputusan dan tindakan yang dipilih oleh organisasi.

## **2. Pemerintah**

Secara garis besar, pemerintah menjalankan dua peran utama, yaitu sebagai pembuat regulasi dan sebagai penyedia layanan publik. Dengan mempertimbangkan kedua peran ini, tidak mungkin sebuah Negara terlepas dari bentuk dan luas wilayahnya dapat terus-menerus menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat. Keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah pusat menjadikan desentralisasi sebagai langkah logis untuk membagi kewenangan kepada pemerintah daerah (Sarundajang, 2000:16). Pemerintah sendiri tidak dibentuk untuk menjalankan kekuasaan demi kepentingannya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (2), mengatur tentang fungsi Pemerintahan meliputi pelaksanaan Administrasi pemerintahan yang mencakup pengaturan, pelayanan, pembangunan,

pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya, pengertian Pemerintahan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diruba terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Philipus (2005), pemerintah dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu sebagai “fungsi pemerintah” (aktivitas pemerintah) dan “organisasi pemerintah” (kumpulan unit-unit pemerintahan). Tugas dan peran pemerintah meliputi berbagai bentuk tindakan, seperti pengambilan keputusan, penetapan kebijakan umum, tindakan dalam ranah hukum perdata, serta pelaksanaan tindakan konkret.

Penegasan peneliti yang saya buat, ini bertujuan untuk tidak menyalagunakan kekuasaan atau sebagai pemimpin baik dari tingkat pusat sampai ditingkat Desa yang bertujuan untuk melayani masyarakat sesuai yang suda dijabarkan diawal yang berdasarkan atas dasar Undang-Undang dan juga seperti yang dijabarkan oleh Plhipus, Fungsi pemerintah secara menyeluruh meliputi berbagai jenis tindakan, termasuk keputusan-keputusan, peraturan umum, langkah-langkah hukum perdata, serta tindakan-tindakan konkret yang dilakukan pemerintah. Yang kemudian harus lebih terperinci dalam melayani masyarakat yang bertujuan dalam kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan infastrukturnya yang memadai untuk lebih mempermudah fasilitas yang



dilalui oleh masyarakatnya dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sekolah dasar, tempat berobat (klinik) sehingga masyarakatnya mudah untuk mengaksesnya.

### **3. Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diruba terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Desa termasuk Desa adat atau sebutan lain yang diakui adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan inisiatif warga, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Desa dipandang sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan domestiknya guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, peran pemerintah Desa menjadi sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan di wilayah Desa adat yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Menurut ketentuan dalam undang-undang (sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi, yang dibantu oleh perangkat Desa. Secara administratif, struktur pemerintahan Desa juga mencakup partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Makarno (2017), pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan di bawah kepemimpinan kepala Desa dan perangkatnya yang mewakili masyarakat dalam hubungan internal maupun eksternal. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Sedangkan menurut Umar (2016), pemerintah Desa memiliki tugas utama dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan Desa, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang berasaskan kepada: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan Desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tongkat strategis

untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### **4. Pengembangan Wisata**

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal 2, diatur bahwa pelaksanaan kegiatan kepariwisataan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipasi, pelestarian, dan keberlanjutan. Selanjutnya, Pasal 4 menyebutkan bahwa pariwisata bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, menjaga kelestarian lingkungan serta sumber daya alam, dan mengembangkan budaya. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan pariwisata juga diharuskan selaras dengan norma-norma agama dan nilai-nilai budaya, guna menciptakan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, serta lingkungan hidup. Hal ini juga mencakup upaya pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Strategi pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di suatu wilayah melalui perbaikan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

A. Yoeti mengemukakan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata, perlu dilakukan analisis lingkungan dan sumber daya yang dimiliki. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan Desa Wisata tersebut.

Dalam pengembangan Desa Wisata, penting untuk menetapkan target dan tujuan yang jelas agar hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Adapun syarat utama agar sebuah Desa Wisata dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang baik antara lain:

1. Desa Wisata harus memiliki daya tarik unik atau ciri khas, baik berupa objek wisata maupun atraksi yang disajikan. Pengembangan potensi wisata harus didasarkan pada apa yang dicari oleh wisatawan, seperti:
  - a. Sumber daya alam (natural resources)
  - b. Atraksi budaya
  - c. Antraksi buatan manusia
2. Tersedianya fasilitas pendukung seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah. Fasilitas seperti akomodasi, fasilitas kuliner, layanan transportasi, sarana ibadah, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Sangat penting untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi wisatawan selama kunjungan.
3. Adanya tempat berbelanja cinderamata, makanan khas, dan produk lokal lainnya. Cinderamata merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang umumnya lebih menghargai keunikan produk dibandingkan harga.

Fasilitas umum yang memadai seperti toilet, tempat parkir, tempat makan, serta fasilitas tambahan seperti ATM dan akses jalan yang layak. Fasilitas-fasilitas ini berperan penting dalam meningkatkan minat wisatawan. Menurut Yoeti, keberhasilan pengembangan pariwisata bergantung pada tiga faktor utama, yaitu tersedianya objek dan daya tarik Wisata, aksesibilitas melalui sarana dan prasarana yang memadai, serta fasilitas penunjang yang mampu memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada wisatawan.

Pengembangan pariwisata juga memerlukan kerja sama erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek pihak swasta sebagai investor, dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menggerakkan sektor pariwisata.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan alasan di balik suatu peristiwa dengan menganalisis keterkaitan antar variabel yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menurut Creswell (2017) bertujuan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan menganalisis fenomena sosial seperti aktivitas,

kepercayaan, sikap, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok yang berkaitan dengan isu-isu sosial tertentu. Sementara itu, menurut Sugiyono (2018) metode kualitatif berlandaskan pada paradigma post-positivisme atau interpretatif, dan digunakan untuk memahami fenomena dalam kondisi alamiah. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dapat diuji tingkat kredibilitasnya, serta dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, merumuskan makna, dan bahkan menemukan hipotesis baru yang muncul dari interaksi dengan individu maupun kelompok di lokasi penelitian. Selanjutnya, menurut Moleong (2007) metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk mengungkap berbagai keunikan dalam kehidupan sehari-hari individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tersebut guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dikaji.

## **2. Unit analisis**

### **a. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informan yang menyediakan data yang dibutuhkan. Dalam

penelitian ini, penelitian dilakukan di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat Nusatenggara Timur

b. Objek penelitian

Menurut Djulianto (2022), objek penelitian merupakan segala hal yang menjadi fokus utama pengamatan karena peneliti ingin memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah strategi pemerintah Desa dalam mengembangkan sektor pariwisata di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Objek penelitian mencakup pemerintah Desa Watukarere serta masyarakat yang tinggal di Desa tersebut.

c. Subjek penelitian

Menurut Citra et al. (2023), subjek penelitian tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga bisa berupa benda, proses, aktivitas, atau lokasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive untuk menentukan narasumber. Narasumber atau informan adalah individu yang mampu memberikan data dan informasi relevan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Subjek penelitian meliputi pemerintah Desa Watukarere dan masyarakatnya, termasuk kepala Desa, perangkat Desa, bagian pengelola Wisata, tokoh masyarakat, warga umum, serta Yayasan Tenun Ikat Kerajaan Laboya.

Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang, yang terdiri dari antara lain:

**Tabel 1. 1 Profil Subjek Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Yohanis Paila Dima	Kepala Desa
2	Samuel Bubu Baiya S.Pd	Sekretaris Desa
3	Alexander Laiya Kulla	Kepala Dusun
4	Poro bili	Toko Masyarakat
5	Martinus M. Nunu	Masyarakat
6	Nona Rhut	Masyarakat
7	Bernadeta B. Tara	Ketua Kelompok Tenun Ikat Karaja Laboya
8	Soleman Hoga	Pelayanan Penerimaan Tamu

*Sumber: monografi Desa Watukarere*

### **3. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, termasuk sumber informasi seperti internet, situs web, video, dan rekaman audio. Dalam penelitian kualitatif, narasumber atau subjek penelitian disebut informan, yaitu individu yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.



Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai elemen yang muncul dalam fenomena pada objek penelitian. Elemen-elemen yang terlihat tersebut disebut data atau informasi yang perlu diteliti dan dicatat secara langsung di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam dan luas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Desa Watukarere dengan cara pemahaman dan pengamatan kondisi di lapangan. Tujuan penggunaan teknik observasi adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan topik penelitian ini.

Observasi yang saya gunakan ini menurut pemahaman saya yang dimana saya mengamati potensi yang menjadi objek wisata atau yang menjadi pembahasan di judul saya, dimana pada saat saya pulang berlibur karena yang menjadi objek wisatanya adalah kampung saya sendiri. Sehingga kemudian tidak

memungkinkan saya balik untuk melakukan observasi langsung dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penelitian saya, sehingga saya menggunakan observasi, penelitian, serta wawancara saya menggunakan media whatsapp, telfon, dan chatting (online)

b. Wawancara

Menurut Sunandar (2017), wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti berkomunikasi langsung dengan responden. Yang kemudian wawancara juga tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau chatting via internet.

Berdasarkan pandangan para ahli diatas peneliti dapat memberikan hasil atau menyimpulkan bahwa, wawancara dapat dimaknai sebagai bentuk interaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk saling bertukar informasi melalui dialog langsung ataupun lewat media telfon dan chatting. Dalam kegiatan pengumpulan data ini, peneliti harus aktif dalam mendengarkan dan mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang diteliti.

Sementara itu, Sunandar (2017) menyoroti bahwa wawancara tidak harus selalu berlangsung secara langsung. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, proses wawancara juga dapat dilakukan melalui media lain seperti sambungan telepon atau percakapan daring (chat), terutama dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pertemuan fisik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode utama dalam memperoleh informasi dari narasumber, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media komunikasi lainnya, untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Lusi Luthfia (2018), dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar berupa laporan atau keterangan yang mendukung penelitian. Studi dokumen biasanya menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari observasi atau wawancara Akan lebih terpercaya dan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai tehknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menganggap dokumentasi sebagai proses pengumpulan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi foto dan dokumen berikut:

d. Foto kegiatan pengelolaan wisata

Kemudian foto kegiatan kelompok pengelola kampung pariwisata adalah: pembuatan pos jaga, kebersihan akses jalan serta lingkungan kampung pariwisata, pembuatan toilet umum/WC, dan kegiatan ibu-ibu dalam proses pembuatan tenun ikat.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengorganisir hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang berlaku. Teknik ini melibatkan upaya peneliti dalam mengatur, menjelaskan, serta menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (2014), yang menyatakan bahwa proses analisis data terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

**a. Reduksi data (data reduction)**

Data yang diperoleh dari wawancara dirangkum oleh penulis setelah proses pengumpulan berlangsung. Selanjutnya, data tersebut dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data dokumentasi yang didapat, seperti dokumen, foto, Surat, dan rekaman wawancara, juga dirangkum dan disortir berdasarkan relevansinya dengan penelitian skripsi ini. Contoh data dokumentasi yang digunakan meliputi profil Desa, Surat izin penelitian, dan monografi Desa. Foto yang dipilih adalah yang memiliki kualitas terbaik, sedangkan rekaman wawancara yang sudah direkap kembali diseleksi sesuai kebutuhan data penelitian.

**b. Penyajian data (data display)**

Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar informasi mudah dipahami dan dapat dikaitkan satu sama lain. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, atau pictogram. Namun, dalam penelitian kualitatif umumnya penyajian data menggunakan teks naratif untuk memudahkan pengambilan kesimpulan yang tepat. Pada penelitian ini, penulis menyajikan data wawancara dalam bentuk narasi yang dianalisis dan dijelaskan sesuai fokus penelitian. Dari penyajian

data ini, penulis memperoleh hasil dan fakta yang ditemukan di lapangan.

**c. Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memverifikasi data yang diperoleh dengan Cara menemukan makna, mengidentifikasi pola keteraturan, serta hubungan sebab-akibat. Dari proses tersebut, kesimpulan akhir dapat ditarik secara tepat dan sistematis.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA WISATA WATUKARERE, KECAMATAN LAMBOYA, KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR**

#### **A. Desa Wisata Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat**

Desa wisata merupakan upaya pengembangan yang berfokus pada daya tarik (atraksi) serta didukung oleh berbagai fasilitas pendukung yang mengandung nilai-nilai budaya dan pranata lokal desa yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Desa Watukarere sebagai desa wisata perlu mengembangkan berbagai lembaga harmonisasi, salah satunya desa wisata itu sendiri, yang pengelolaan dan pengembangannya berbasis pada potensi kampung pariwisata yang dimiliki dan berpusat pada peran serta masyarakat lokal.

Desa Watukarere dalam pengembangan desa wisata berperan sebagai pusat atau sentral pariwisata. Dalam upaya pembangunan dan pengembangan kawasan wisata, pemerintah desa Watukarere bertindak sebagai penggerak utama dalam pengelolaan dan penataan sentral wisata atau kampung pariwisata. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kampung pariwisata yang dilakukan dengan persetujuan dan izin dari pemerintah desa, masyarakat setempat membentuk struktur organisasi sementara untuk mengelola kampung pariwisata, yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

***Tabel 2. 1 Susunan pengurus sementara kampung pariwisata  
Desa Watukarere***

No	Nama	Jabatan
1.	Poro Bili	Ketua umum
2	Martinus M. Nunu	Wakil ketua I
3	Kristopel K. Banyo	Wakil ketua II
4	Astiana W. Gallu	Bendahara
5	Yusup Y. Baiya	Petugas penerima/pelayanan
6	Soleman Hoga	Petugas penerima/pelayanan

*Sumber: monografi Desa Watukarere*

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa merupakan dari susunan pengurus sementara pengelola kampung pariwisata yang dimiliki oleh Desa Watukarere dan yang dikelola oleh masyarakat watukarere sendiri.

### **1. Tenun Ikat Karaja Laboya**

Dalam mendukung berjalannya program Tenun Ikat Karaja Laboya tentunya pemerintah Desa Watukarere harus mendukung penuh dalam aktifitas program Tenun Ikat yang dijalankan oleh masyarakat setempat, serta seluruh pengurus dan anggota Tenun Ikat Karaja Laboya harus saling mendukung dan konsisten yang diimplementasikan melalui program-program Tenun Ikat yang sudah terlaksana pada saat ini.

Dalam proses pelaksanaan Tenun Ikat Karaja Laboya atas pengetahuan/perijinan pemerintah desa watukarere serta atas



bersama instansi lain melalui EGK, maka masyarakat setempat membentuk struktur organisasi kepengurusan dalam pengelolaan program yang sudah dijalankan, sebagai berikut:

***Tabel 2. 2 Struktur pengurus tenun ikat karaja laboya***

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Bernadeta B. Tara	Ketua
2	Nona Rhut	Wakil ketua
3	Astiana W. Gallu	Bendahara
4	Theodora B. Tara	Anggota
5	Marta Maa	Anggota
6	Majisel	Anggota
7	Dorkas	Anggota
8	Wea	Anggota
9	Theodora T. Banyo	Anggota
10	Ince	Anggota
11	Ela	Anggota
12	Herlin	Anggota
13	M. asti	Anggota

*Sumber: monografi Desa Watukarere*

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa merupakan susunan struktur organisasi kelompok tenun ikat yang di kelola oleh ibu-ibu dusun satu Kampung Watukarere, dari program tersebut dapat mendukung dalam pengembangan kampung pariwisata

yang telah dijalankan oleh masyarakat dusun satu desa watukarere yang berjalan sampai saat ini.

***Gambar 2. 1 Kampung situs Watukarere***



*Sumber: foto Desa Watukarere draund*

Kampung watukarere merupakan kampung pariwisata yang menjadi pusat wisata desa watukarere dan keadaan kampung pariwisata dengan rumah adatnya menggunakan bahan-bahan yang merupakan dari alam, baik dari kayu, bambu, tali, serta atapnya yang dari bahan alang.

***Gambar 2. 2 Kegiatan tenun ikat ibu-ibu***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

Kegiatan kelompok tenun ibu-ibu desa watukarere khususnya dusun 1 Kampung Watukarere dengan penuh semangat dalam melakukannya sambil bernyanyi lagu daerah serta direkam oleh team media untuk menjadikan video klip yang bertujuan untuk mempromosikan melalui media massa.

**Gambar 2. 3 Kunjungan ibu menteri pariwisata**



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

Masyarakat dusun 1 Kampung Watukarere dalam menyambut kedatangan ibu menteri pariwisata pada saat berkunjung dikampung pariwisata serta melihat aktifitas tenun ikat yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok tenun serta pengelolaan kampung pariwisata, dan beliau sangat mendukung atas program yang dijalankan oleh masyarakat setempat, dengan turut serta ibu menteri memberikan bantuan uang tunai untuk dimanfaatkan dalam pengembangan kampung pariwisata/penataan yang berkelanjutan dimasa depan.

***Gambar 2. 4 Kegiatan percobaan penenun kain***



*Sumber: foto Desa Watukarere*

Kegiatan percobaan menenun kain sarung oleh ibu menteri pariwisata bersama ibu-ibu kelompok tenun yang dilakukan pada saat berkunjung dikampung pariwisata desa watukarere.

***Gambar 2. 5 Proses pembuatan WC/Toilet umum***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*



***gambar 2. 6 Proses pembuatan WC/Toilet umum***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

Kegiatan pembuatan WC/kamar mandi umum yang dilakukan oleh masyarakat kampung watukarere atas bantuan yang diberikan oleh pendeta Ham dari korea untuk kampung pariwisata, yang bertujuan untuk mengakses fasilitas yang memadai pada saat tamu datang berkunjung di kampung pariwisata.

***Gambar 2. 7 Proses pembuatan kain tenun/sarung***



*sumber: foto Desa Watukarere henfone*

***Gambar 2. 8 Proses guling benang***



*Sumber: foto Desa Wtukarere henfone*

Kegiatan percobaan yang dilakukan oleh pengunjung/tamu manca negara bersama ibu-ibu kelompok tenun ikat serta masyarakat lainnya di desa watukarere, sangat kompak dan sling mendukung dalam menjaga kebahagiaan dan kenyamanan para pengunjung dikampung pariwisata.

***Gambar 2. 9 Hasil dari pengolahan kain sarung***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

***Gambar 2. 10 Awal pembukaan program pengolaan kampung Wisata dan Tenun Ikat yang pimpin oleh kepala Desa Watukarere***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

Kegiatan dimana pada awal pembukaan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat atas kerja sama antara EGK (engglis go to kampung), pemerintah desa watukarere, dan masyarakat setempat yang dibuka langsung oleh kepala desa watu watukarere dan sekaligus diketahui oleh pemerintah serta memberikan ijinan dalam pelaksanaan program-program tersebut.



***Gambar 2. 11 Tahap percobaan dan promosi kain tenunnya***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

***Gambar 2. 12 Proses percobaan ibu mentri pariwisata untuk penggulangan benang***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*



***Gambar 2. 13 Proses penggulungan benang ibu-ibu tenun ikat karaja***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

Dari gambar diatas merupakan rangkaian kegiatan ibu-ibu kelompok tenun ikat serta masyarakat setempat pada umumnya yang dimana mereka sangat antusias dan kompak dalam melaksanakan program yang mereka sudah memulainya, dimana pada setiap satu minggu dua kali melakukan kegiatan dan berkumpul bersama serta berbincangkan langkah-langkah berikutnya yang harus di jalankan lagi. Yang artinya bertujuan untuk terus meningkatkan dalam penataan kampung pariwisata mulai dari kebersihan, kenyamanan, dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang belum tersedia dalam kampung pariwisata.

## **2. Kondisi Budaya**

Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Desa Watu Karere masih sangat kental dengan budaya Sumba (Budaya peninggalan leluhur), Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa

Watu Karere masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat Sumba yang ada dan berkembang di desa Watu Karere banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual Agama, Marapu, dan perilaku orang tua terdahulu.

Bagi masyarakat Desa Watukarere, menjaga, merawat, dan melestarikan kebudayaan merupakan suatu kewajiban yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan umum masyarakat, budaya tidak hanya dipraktikkan pada momen atau waktu tertentu, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam dan sejalan dengan prinsip hidup masyarakat Sumba. Nilai-nilai budaya tersebut hingga kini masih terpelihara dengan baik, tidak hanya di Desa Watukarere, tetapi juga di berbagai desa lain di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Tradisi gotong royong dan semangat kebersamaan masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kearifan lokal, seperti sikap ramah, saling menyapa, serta penggunaan bahasa daerah Sumba yang sopan kepada orang yang lebih tua, tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi hingga saat ini.

***Gambar 2. 14 Kegiatan budaya mencari ikan dimuara***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfon*

Magowo (menangkap ikan dimuara) merupakan budaya/tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang artinya wulla paddu bagi masyarakat desa watukarere dan masyarakat pada umumnya yang tergabung dalam satu kecamatan yaitu kecamatan lamboya yang merupakan kepercayaan masyarakat Adat dan disertai dengan ritual lainnya.

***Gambar 2. 15 Budaya kedde bawa hewan***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfon*

Kedde (pesta) merupakan adat dan budaya yang masih terjaga dan terus dilestarikan oleh masyarakat desa watukarere, yang dimana ketika adanya pemakaman orang meninggal atau peresmian rumah adat dan acara-acara lainnya masih dilakukan sampai turun-temurun bagi masyarakat desa watukarere pada umumnya.

***Gambar 2. 16 Budaya nonton topeng***



*Sumber: foto Desa Watukarere henfon*

Torro Ata Matti (nonton orang hitam) merupakan antraksi budaya yang tetap dilestarikan oleh masyarakat desa watukarere dan khususnya masyarakat dalam satu kecamatan, yang dimana setiap tahunnya dibulan tertentu akan dilaksanakan yang sudah ditetapkan oleh Rato (orang adat marapu). Sehingga ini adalah budaya yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat desa watukarere sampai pada saat ini.

*Gambar 2. 17 Budaya pasola*



*Sumber: foto Desa Watukarere henfone*

Kahalana (pasola berkuda) merupakan adat dan budaya yang di wariskan para leluhur yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan februari, sehingga sampai saat ini masyarakat desa watukarere masi tetap melestariakan karena itu merupakan antraksi budaya yang sakral dimana masi sangat dipercaya oleh masyarakat desa watukarere akan berkat yang datang setelah melakukakan/menyaksikan dan melakukan ritual sebagai kepercayaan orang maurupu akan Tuhan yang maha esa.

## **B. Sejarah Desa Watukarere**

Secara administratif, Desa Watu Karere merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah resmi dibentuk sebagai bagian dari wilayah tersebut pada tahun 1993 yang merupakan pemekaran dari Desa Induk Desa Laboya Bawa dan definitive sejak tahun 1994 yang dipimpin oleh Bapak Mete Bulu yang terpilih sebagai Kepala Desa.

Tokoh–tokoh perintis pemekaran Desa Watu Karere adalah sebagai berikut :

1. Djewu Gara
2. Mete Bulu
3. Thomas T. K. Lolu
4. Timotius T. K. Lolu
5. Jewu Duka (Alm)
6. Welem W. Ledy

Dalam kepemimpinan Bapak Mete Bulu, banyak hal yang telah terjadi yakni mendorong keswadayaan masyarakat untuk membangun kantor desa yang belum permanen. Hal ini memacu seluruh masyarakat untuk berswadaya dan memotivasi masyarakat untuk bersemangat.

Desa Watukarere adalah salah satu Desa Wisata yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016. Secara geografis terletak pusat pemerintahan kabupaten/kota dikabupaten Sumba Barat (Waikabubak). Desa Watukarere termasuk salah satu Desa dari 74 (Tuju Pulu Empat) Desa. Desa Watukarere sebagai Desa yang menjunjung nilai-nilai budaya/adat, tradisi, kesetaraan, dan kepekaannya terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 3 Adapun para kepala Desa yang memimpin Desa Watu Karere**

No	Nama kepala desa	Masa jabatan	Keterangan
1	Djewu Garra	1997 (enam bulan)	Desa Persiapan
2	Mete Bulu	1995-1998	Antar waktu
3	Christopel Kedu Banyo	1999-2004	Definitif
4	Simon Kedu Lere	2005-2010	Difinitif
5	Kedu Lere	2010-2016	Definitf
6	Cornelis Kadobo	2017 (6 Bulan)	Antar Waktu
7	Reko Deta	2018-2023	Definitif
8	Samuel Dubu Baiya, S.Pd	2023 (2 Bulan)	Antar Waktu
9	Yohanis Paila Dima	2024 - 2029	Definif

*Sumber: monografi Desa Watukarere*

Dengan berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menganalisis/ menyimpulkan bahwa nama-nama yang tercatat diatas adalah sebagai pemimpin pertama desa watukarere sampai saat ini dengan berdasarkan kepercayaan masyarakat yang dipercayakan kepada mereka.

### **C. Kondisi Sosial Dan Budaya Desa Watukarere**

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

#### **1. Kondisi Demografis / Kependudukan.**

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2023 jumlah Penduduk Desa Watu Karere yang terdiri dari Penduduk Laki - laki = 1.207 Jiwa dan penduduk Perempuan = 1.133 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Watu Karere.

#### **2. Kondisi Kesehatan Masyarakat**

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana

kesehatan yang memadai dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan Kesehatan dengan desa seluas desa Watu Karere, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2024 - 2029, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 5 (lima) Posyandu balita dan ibu hamil yang ada di desa Watu Karere untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita dan ibu hamil yang ada di desa Watu Karere. Suatu keuntungan letak Desa Watu Karere yang berdekatan dengan Rumah Sakit Pratama yang berada di wilayah Kecamatan Lamboya sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

### **3. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan**

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya.



Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi-informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

**Tabel 2. 4 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>prosentase</b>
1	Tidak / Belum Sekolah	642	27,43
2	Belum Tamat SD/Sederajat	442	18,88
3	Tamat SD/ Sederajat	427	18,24
4	SLTP/Sederajat	406	17,35
5	SLTA / Sederajat	387	16,53
6	Diploma I / II	0	0
7	Akademi/ Diploma III/S. Muda	15	0,64
8	Diploma IV/ Strata I	20	0,85
9	Strata II	1	0,04
10	Strata III	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.340</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber: monografi desa watukarere*

Berdasarkan data pendidikan didesa watukarere menunjukan bahwa presentase penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak berada pada kelompok yang belum sekolah/tidak dengan presentase mencapai jumlah yang paling terbanya, kemudian diikuti belum tamat SD/sederajat dengan presentase mencapai angka terbanyak dan seterusnya. Artinya jangkauan pendidikan didesa watukarere sangat minim, ini menandakan bahwa jumlah penduduk DIII atupun sarjana muda tidak lebih banyak dari angka diatas. Dalam hal ini, data diatas tidak hanya di tafsirkan oleh peneliti lewat angka tetapi memberikan gambaran sehingga pemerintah desa watukarere dapat menyiapkan ruang pendidikan

yang demokratis dengan membuat program desa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mutu dan berkualitas. Maka watak dari pada pembangunan tidak jatu pada pembangunan orde baru yang statis dan hanya golongan tertentu yang dapat mengakses pendidikan tinggi.

#### 4. Berdasarkan Mata Pencaharian

Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Watu Karere, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Watu Karere sangat beragam dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

*Tabel 2. 5 Berdasarkan mata pencaharian*

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Belum/Tidak Bekerja	563	24,05
2.	Mengurus Rumah Tangga	403	17,22
3.	Pelajar/Mahasiswa	672	28,71
4.	Pensiunan	3	0,12
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS/P3K)	10	0,42
6.	Kepolisian RI (Polri)	3	0,12
7.	Perdagangan	0	0
8.	Petani/Perkebunan	558	23,84
9.	Industri	0	0
10.	Konstruksi	0	0
11.	Karyawan Swasta	45	1,92
12.	Karyawan Bumh	0	0
13.	Karyawan Honorer	13	0,55
14.	Buruh Harian Lepas	0	0
15.	Buruh Tani/Perkebunan	0	0
16.	Pembantu Rumah Tangga	1	0,04
17.	Tukang Batu	0	0
18.	Tukang Kayu	12	0,51
19.	Tukang Las/Pandai Besi	0	0
20.	Tukang Jahit	6	0,25

21.	Mekanik	2	0,08
22.	Juru Masak	0	0
23.	Dosen	0	0
24.	Guru	8	0,34
25.	Bidan	2	0,08
26.	Perawat	11	0,47
27.	Sopir	17	0,72
28.	Pedagang	0	0
29.	Perangkat Desa	12	0,51
30.	Wiraswasta	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.340</b>	<b>00,00</b> <b>%</b>	

*Sumber: monografi desa watukarere*

Berdasarkan mata pencarian penduduk di desa watukarere dari tabel diatas sebagian bekerja sebagai petani kemudian diikuti dengan kelompok yang belum bekerja serta pekerja ruma tangga dll nya. Dalam hal ini kepekaan pemerintah desa watukarere terhadap situasi yang harus ditingkatkan sehingga tidak hanya meyenglanggarakan pemerintahan secara procedural yang kemudin menciptakan tidak kemampuan pemerintah desa watukarere dalam menjawab problem sosial yang terjadi setiap tahun bahkan setiap proode pergantian kepala desa. Menurut (Sutoro Eko Yunanto) hal tersebut identik dengan “masa lalu desa” yang dipandang terbelakang, miskin, kebodohan yang merupakan fakta lapangan di seluruh pelosok Indonesia.

Berdasarkan uraian dan analisis jumlah penduduk dengan berdasarkan mata pencarian bahwa pemerintah desa watukarere dalam mengatur dan mengurus desa belum mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat desa.

## **5. Kesejahteraan Masyarakat**

Dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa Watu Karere, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

## **6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Dalam perspektif Agama, masyarakat di Desa Watu Karere termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwa masyarakat desa Watu Karere mayoritas beragama Kristin Protestan dan Katholik. Tingkat mayoritas agama Islam di Desa Watu Karere sangat kecil dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Watu Karere, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

**Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	21	0,89
2	Khatolik	1.032	44,10
3	Kristen	1.287	55
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.340</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber: monografi desa watukarere*

Berdasarkan data jumlah Agama di desa watukarere menunjukan bahwa masyarakat desa watukarere secara umum beragama khatolik dan Kristen protestan atau mayoritas nya yang memeluk agama khatolik dan Kristen protestan, yang kemudian diikuti oleh masyarakat yang beragama Islam. Dalam hal ini fasilitas keagamaan yang terdapat di desa watukarere cukup memadai yang dimana hampir disetiap dusun terdapat gereja. Hanya dalam fasilitas untuk non Kristen/khatolik yang tidak ada.

Yang menarik perhatian peneliti dalam melihat data penduduk berdasarkan agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, kepercayaan akan hidup, kepercayaan akan alam semesta. Inilah keabsahan sesungguhnya meyerahkan hidup pada alam semesta yang memberi akan segalanya.

#### **D. Kondisi Geografis**

Secara Geografis Desa Watu Karere terletak pada 8 Km dari Ibu Kota Kecamatan Lamboya dan 36 Km dari Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat. Dengan luas wilayah Desa Watu Karere 9,36 km<sup>2</sup>.

**1. Batas-Batas Wilayah Desa Watukarere**

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ringu Rara
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Patiala Bawa dan Desa Laboya Bawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hobawawi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pala Moko dan Laut Indonesia

**E. Kondisi Ekonomi Desa Watukarere**

Desa Watu Karere mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Watu Karere tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Watu Karere terbagi menjadi 4 kewilayahan, tentunya karena terbagi menjadi 4 kewilayahan potensi ekonomi sangatlah berbeda, Sebagian besar bergerak disektor pertanian, UMKM dll, untuk 4 wilayah dusun mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri rumah tangga, Pertukangan dan karyawan swasta.

**F. Kondisi Infrastruktur/Sarana-Prasarana Desa Watukarere**

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Watu Karere bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun

dikarenakan bukan menjadi kewenangan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

***Tabel 2. 7 Sarana dan prasarana desa watukarere***

<b>No</b>	<b>Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Paud	1
2	SD	2
3	Lapangan voli	1
4	Posyandu	<b>5</b>
5	Puskesmas	1
6	Embung	2
7	Perumahan	20
8	Greja	4
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>

*Sumber: monografi desa watukarere*

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat memberikan analisis/ kesimpulan bahwa sarana-prasarana yang ada di desa watukarere yang sesuai keinginan masyarakat suda mencapai standar mulai dari jalan, perumahan, paud, SD, posyandu, puskesmas, gereja, dll nya. Itu semua atas dasar untuk mempermudah akses masyarakat pada saat berkegiatan atau kebutuhan lainnya.

#### **G. Pemerintahan Desa Watukarere**

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek, termasuk pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh pemerintah desa. UU ini memberikan makna baru terhadap posisi desa, yang berhak mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa mengadopsi kembali model pemerintahan lama yang bersifat hierarkis, sentralistik, dan birokratis seperti sistem kolonial (*binnenlands bestuur*). Dalam UU terbaru

ini, konsep yang dipakai bukan lagi otonomi desa, melainkan “kemandirian desa”. Konsep ini berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang memandang desa sebagai pemerintahan kecil di bawah kecamatan, sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, sebuah campuran antara pemerintahan lokal dan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (Eko, 2014).

UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan dua prinsip utama, yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Prinsip rekognisi mengakui dan menghormati hak asal-usul desa yang mencakup sistem nilai, tradisi, adat istiadat, serta potensi lokal desa. Dalam konteks program strategis desa, hak pemerintah desa bersama masyarakat adalah menetapkan kewenangan dan mengambil keputusan yang bersifat lokal demi kepentingan bersama (Nancy Fraser, 1996). Lebih jauh, desa dipandang sebagai organisasi yang mengelola urusan pemerintahannya sendiri, bukan hanya sebatas pengakuan negara, melainkan sebagai bentuk pemerintahan masyarakat yang berupaya mewujudkan keadilan budaya (cultural justice) dan keadilan ekonomi (economic justice). Dengan demikian, rekognisi tidak hanya berarti pengakuan dan penghormatan, tetapi juga harus diikuti dengan terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Desa Watukarere dalam menjalankan roda pemerintahan harus memahami skala krusial kewenangan desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah



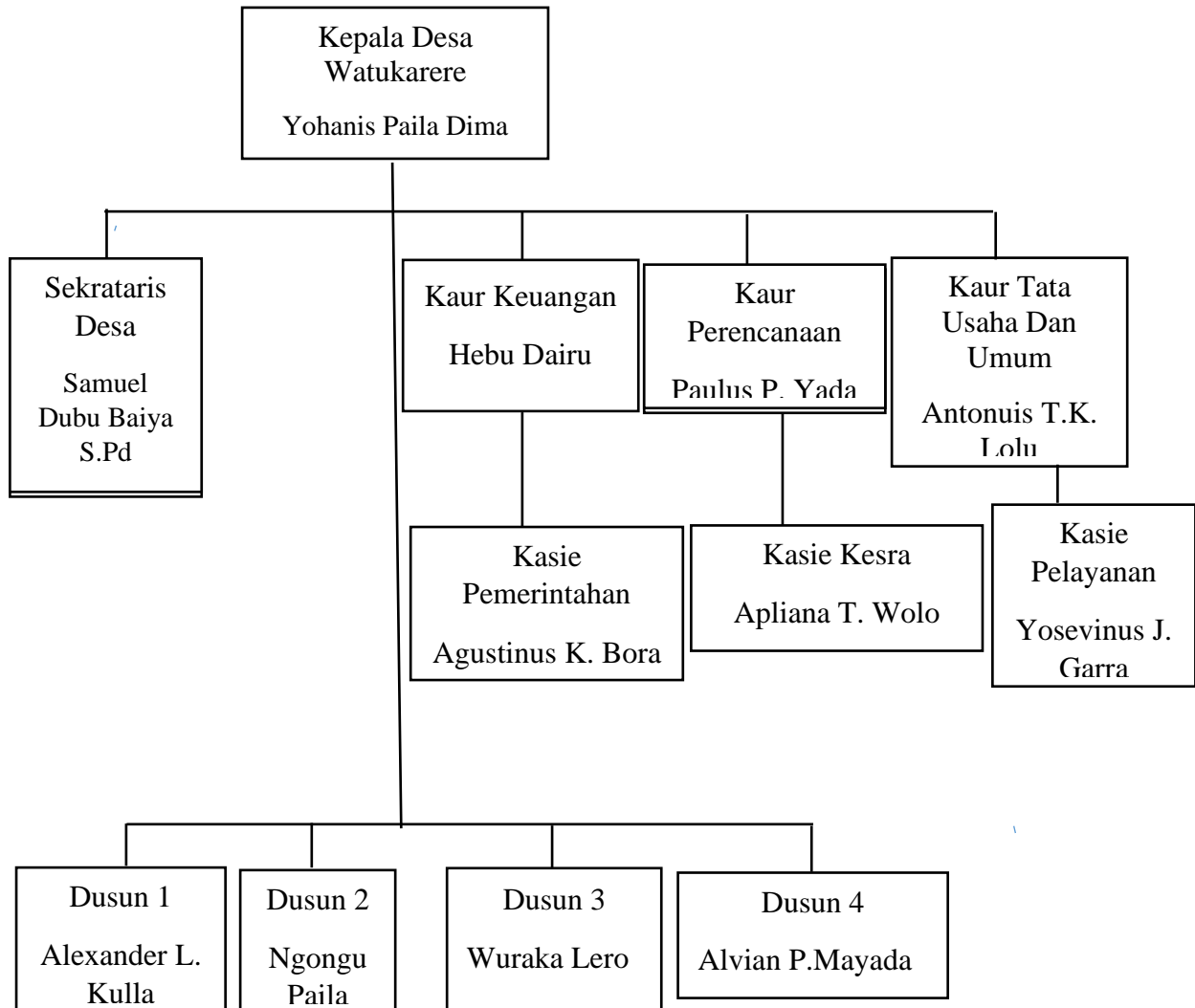
desa, dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan urusan pemerintahannya selain melaksanakan musyawarah desa dalam mengatur urusann pelaksanaan pemerintahan, ternyata masih terpaku dengan model pemerintahan lama yang hirarkis dan sentralistik, yang menjadikan desa sebagai objek sasaran pembangunan. Dalam UU Desa dikenal dengan konsep pembangunan desa yang top down dan birokratis. Sutoro Eko Yunanto, selaku salah satu founding fathers perancang Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 menegaskan membangun desa adalah konsep pembangunan pedesaan (rural development) yang membangun desa sambil melemahkan desa dan merusak desa. Maka seharusnya pemerintah desa watukarere dalam menjalankan pemerintahannya tidak lagi melihat desa sebagai pemerintahan kecil dibawah kecamatan ataupun daerah. Landasannya dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan desa harus sesuai dengan asas desa dan potensi local desa sesuai kebutuhan dan kewenangan desa tidak lagi pada model pembangunan sentralistik.

#### **1. Pembagian Wilayah Desa Watukarere**

Secara adminisrasi Desa Watu Karere terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun, 9 RW dan 16 RT yakni : Dusun I/Watu Karere, 2 Rw dan 2 Rt, Dusun II/Allang, 2 Rw dan 4 Rt, Dusun III/Tailelu, 3 Rw dan 6 Rt dan Dusun IV/Lete Malauna, 2 Rw dan 4 Rt. Adaun tujuan pembagian wilayah adalah untuk mendekatkan jangkauan pelayanan Pemerintah Desa Watu Kare

## 2. Struktur Pemerintah Desa Watukarere

**Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Desa Watukarere**



### **3.Visi-Misi Pemerintah Desa Watukarere**

Pemerintah desa watukarere bersama perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan tentu memiliki visi-misi yang maju dan membangun desa serta mengembangkan potensi sosial masyarakat. Kemudian pada dasar pembangunan infrastruktur perlu untuk mendukung visi dan misi pemerintah desa watukarere yang dimana menjadikan desa watukarere sebagai desa wisata dan salah satu faktor pendukung adalah fasilitas yang memadai.

Kawasan wisata yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa watukarere di antaranya kampung wisata yang menjadi titik sentral pariwisata, yang kemudian akan menjadi kawasan wisata desa watukarere. Hal tersebut dalam proses dijalankan/pengembangan untuk mencapai sebagai salah satu pendapatan atau kestabilan ekonomi masyarakat lokal.

#### **Visi**

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat, Terciptanya Rasa Memiliki Dan Tanggungjawab Terhadap Program Pembangunan Di Desa Watu Karere.

#### **Misi**

Mewujudkan Arah, Tujuan, Strategi Pembangunan Desa, Menyelaraskan Rencana Kegiatan Desa Dan Anggaran, Memelihara Dan Mengembangkan Hasil-Hasil Pembangunan Di Desa, Menumbuhkembangkan Dan Mendorong Peran Serta Masyarakat Di Desa Watu Karere Dalam Proses Pembangunan.

**Tabel 2. 8 Jumlah Pengunjung di Kampung Pariwisata di Desa Watukarere**

No	Pengunjung kampung pariwisata/hari	Jumlah
1	Senin	6
2	Selasa	8
3	Rabu	8
4	Kamis	8
5	Jumat	10
6	Sabtu	15
	<b>Total</b>	<b>55 orang</b>

*Sumber: monografi Desa Watukarere*

Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menganalisis bahwa yang dimana menunjukan data atau jumlah pengunjung dikampung pariwisata di Desa Watukarere, bahwa setiap harinya pengunjung yang datang berkunjung di Kampung Pariwisata bisa berkisaran di enam orang dan bahkan sampai 15 orang dalam perhari. Sehingga kemudian ini yang menjadi dasar semangat masyarakat setempat dalam pengelolaan Kampung Pariwisata dan Tenun Ikat Karaja Laboya yang dimana hasil pengelolaan mereka di minati langsung para pengunjung wisatawan dan berdampak baik untuk ibu-ibu pelaku Tenun Ikat Karaja Laboya serta masyarakata Kampung Watukarere pada umumnya.

**BAB III**

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN STRATEGI PEMERINTAH DESA**

**WATUKARERE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA**

**WATUKARERE**

Pada penulisan bab ini, peneliti membahas secara khusus strategi pemerintah Desa Watukarere dalam pengembangan Desa Wisata yang ditetapkan sebagai Desa Wiata dan berkaitan pada perencanaan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok pengelola kampung pariwisata, dan tenun ikat karaja laboya serta seni dan budaya, wirausaha, pemberdayaan perempuan dan anak, serta wisata. Pada Bab sebelumnya peneliti sudah menguraikan beberapa poin penting tentang Desa Wisata dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere dan kondisi keadaan objektif Desa yang dapat dianalisis sebagai bahan perbandingan peneliti untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat.

**A. Perencanaan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Watukarere**

Desa watukarere adalah Desa Wisata yang dimana memiliki potensi kampung situs yang menjadi dasar Desa Watukarere sebagai Desa Wisata. Dalam perencanaan dan mengaktualisasikan nilai-nilai melalui pendayagunaan segenap sumber daya kekayaan dan budaya yang dimiliki oleh desa. Dalam perencanaan, pemerintah desa dapat mengupayakan pembangunan dan pengembangan desa wisata dengan mengaktualisasikan

nilai-nilai budaya, kesenian, tradisi, pengembangan kuliner, dan warisan budaya lainnya, dengan demikian dapat menciptakan formula keseimbangan dalam masyarakat yang dimana tidak lagi terciptanya kesenjangan sosial dimasyarakat. Maka perlu adanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Di lain sisi, pola pengambilan keputusan harus bersifat bottom up yang artinya berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bahwa yang bersentuhan langsung dengan proses perencanaan dan pembangunan atau dalam pengembangan Desa Wisata.

Lewat peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No. 6 Tahun 2023 tentang pengelolaan Desa Wisata, mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan. Oleh karenanya ada upaya/perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata sebagai basis pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka sinergi antara pemerintah Desa sudah diatur mengenai tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengelolaan/pengembangan Desa Wisata dengan cara memotivasi, mengembangkan, membimbing, dan memperkuat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wisata. Dalam wawancara mendalam bersama kepala Desa Watukarere Yohanes Paila Dima menyampaikan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata sangat perlu didorong penuh oleh pemerintah setempat, selanjutnya sebagai berikut:

“program yang saya kembangkan tentang pariwisata yaitu kampung watukarere dengan tidak menggunakan atap seng melainkan harus menggunakan atap alang alami, kebersihan, tenun ikat, penerangan/listrik, pos jaga yang bertujuan untuk supaya bisa membuat buku tamu/laporan diri para pengunjung wisata setelah itu baru diijinkan masuk dalam kampung situs. Kami sebagai pemerintah desa setempat membuka forum musawarah bersama masyarakat lokal untuk membahas apa yang mau dibangun dalam pengembangan kampung situs dan meminta partisipasi aktif oleh masyarakat setempat, misalnya dalam membangun pagar kampung keliling, menjaga kebersihan kampung pariwisata. Dalam melindungi potensi lokal yang dimiliki oleh desa watukarere kami sebagai pemerintah desa mengadakan rapat bersama seluruh masyarakat kampung watukarere yang bertujuan untuk terus menjaga peningkatan daya Tarik kampung situs, keamanan kampung watukarere, kenyamanan pengunjung, kebersihan akses jalan menuju kampung situs, dan menjaga kebersihan air bersih. Pandangan kami sebagai pemerintah desa dalam melihat efektivitas aktifitas program wisata yang dijalankan oleh masyarakat setempat itu sangat membantu sekali dan bersyukur dengan adanya program itu sangat-sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi meningkat, ditamba lagi dengan adanya kerja sama yang baik antara EGK (tenun ikat karaja laboya) ini salah satu penarik bagi para pengunjung untuk datang dikampung situs watukarere. (Wawancara pada hari kamis 3 juli 2025).”

Pemerintah Desa Watukarere harus mampu mengelola anggaran untuk membangun dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Proses perencanaan pembangunan/dukungan dapat menjadi tolak ukur kesiapan Desa Watukarere menjadi Desa yang maju dan sejahtera. Artinya pelestarian, memelihara, membina dan mengembangkan serta mempertahankan menjadi tolak ukur selain pada proses, fungsi dan hasil. Sehingga kemudian monitoring dan evaluasi dapat melihat keseriusan dan tanggung jawab pemerintah Desa Watukarere dalam mendorong,

mengorganisir, mengkonsolidasikan pada seluruh elemen masyarakat sehingga dalam pengembangan potensi yang dimiliki menjadi berguna dan mempunyai nilai jual yang maksimal serta mampu mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Watukarere, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Watukarere dapat bekerja keras dan mendukung penuh program yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk musawarah untuk bagaimana dalam pembangunan dan pengembangan potensi yang ada bahwa tidak hanya tanggung jawab masyarakat namun pemerintah Desa Watukarere juga tetap bertanggung jawab bersama masyarakat secara keberlanjutan.

Dalam pengamatan/analisis peneliti dengan merujuk pada penyampaian yang disampaikan oleh kepala Desa Watukarere pada wawancara diatas, peneliti dapat berargumen bahwa pemerintah/kepala Desa itu sendiri sebagai penggerak utama belum ada langkah konkrit atau program nyata yang dijalankan sesuai dengan potensi yang ada di Desa Watukarere, yang dimana Desa Watukarere mempunyai potensi kampung pariwisata yang strategis dan menjadi sumber pendapatan masyarakat maupun Desa itu sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Martinus M. Nunu selaku masyarakat Desa Watukarere terkait program utama atau perencanaan dari pemerintah Desa Watukarere yang sudah dilaksanakan, sebagai berikut:



Begini adik kalau soal program yang telah dijalankan atau yang telah disalurkan oleh pemerintah desa yang bisa disaksikan oleh masyarakat setempat secara material memang belum ada Sama sekali, tetapi hanya melalui secara dukungan, pikiran, arahan, dan hadir langsung pada saat pelaksanaannya. Yang kemudian adik memang ini ada bantuan WC/kamar mandi yang telah dibangun oleh masyarakat namun itu bantuan langsung dari EGK (engglis go to kampung) dan selanjutnya juga ada bantuan air bersi dari Hotel Nihi Sumba melalui program Sumba Fondaition (SF) yang di terima oleh masyarakat dan setiap bulannya mengumpulkan iuran RP. 20.000 untuk mengisi pulsa listrik, sehingga itu bukan bagian dari program utama pemerintah desa watukarere, namun hanya sekedar mengetahui dan mengizinkan untuk dibangun. Kalau Soal penerangan adik itu bantuan langsung dari pemerintah kabupaten dan kemudian untuk meterannya kami sebagian ada yang menerima secara gratis dari PLN dan sebagiannya juga ada yang beli sendiri. Dengan adanya program kampung wisata dan tenun ikat itu sendiri adik yang dikelola oleh masyarakat setempat sampai saat ini, kami sebagai masyarakat setempat sangat bersyukur dan telah merasakan dampak positifnya dimana pendapatan atau peningkatan ekonominya suda sangat membaik dan sangat membantu ketika hasil dari tenun ikatnya kami jual kepada pengunjung kampung wisata. Dan yang berikutnya adik uang masuk yang kami pungut dari tamu yang datang berkunjung kami tabung untuk persiapan dalam pembangunan pagar kampung dan penataan lainnya. (Wawancara pada hari jumat 4 juli 2025).

Dari hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh bapak Martinus M. Nunu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang disaksikan langsung oleh masyarakat setempat dalam penyaluran atau pelaksanaan program utama oleh pemerintah Desa Watukarere, memang adanya belum ada sama sekali yang di jalankan oleh pemerintah setempat melainkan itu semauh yang telah terlaksana adalah bantuan langsung dari EGK (engglis go to kampung) bersama Hotel Nihi Sumba melalui program SF.

Adapun pernyataan diatas bahwa itu adalah realita yang terjadi, pemerintah Desa Watukarere sebagai kepala wilayah setempat tidak

terlepas dari tanggung jawab penuh sebagai pemerintah untuk mengontrol dan bagaimana memikirkan program-program strategi dalam membangun atau mengelola potensi yang dimiliki oleh desa watukarere.

Dalam hal ini dengan merujuk pada penyampaian yang disampaikan oleh kepala desa dan bapak Martinus M. Nunu sebagai masyarakat, peneliti dapat berargumen bahwa pemerintah desa masih minimnya teknik strategis dalam hal pengembangan atau pengelolaan kampung pariwisata sehingga kemudian sedikit ada perbedaan atau bertolak belakang apa yang telah disampaikan oleh kepala desa itu sendiri. Yang seharusnya pemerintah desa adalah penggerak utama dalam hal mengayomi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan program bantuan untuk meringankan masyarakatnya dalam pengelolaan program kampung pariwisata maupun program tenun ikat karaja laboya yang telah dijalankan oleh masyarakat setempat.

Kemudian, peneliti melaksanakan wawancara dengan Ibu Nona Rhut sebagai perwakilan masyarakat sekaligus bagian dari Tenun Ikat Karaja Laboya beliau menyampaikan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam program pengembangan kampung situs dan Tenun Ikat, sebagai berikut:

Ia adik baik, dalam keterlibatan kami sebagai masyarakat khususnya yang tinggal dikampung watukarere sangat kompak dan bersatu dalam pikiran mulai dari awal berjalannya program kampung wisata yang kami jalankan sekarang dan bergotong royong yang dimana disetiap hari jumat kami melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan kampung pariwisata untuk selalu menjaga kebersihan kampung situs dan kenyamanan tamu yang datang

berkunjung dikampung watukarere. Yang berikutnya adik kami sebagai ibu-ibu melakukan kegiatan tenun ikat yang berbarengan dengan program kampung wisata dan kemudian di bantu langsung oleh EGK dengan di berikan modal awal untuk menenun kain sarung yang terbuat dari kapas hutan dan pewarna alami, yang bahan pewarnanya diambil dari kulit pohon pilihan yang tumbuh dihutan. Dan juga adik setelah program ini berjalan kurang lebih dalam waktu 3 bulan ibu mentri pariwisata pada saat ia berlibur di Hotel Nihi Sumba kemudian diajak oleh ketua yayasan EGK ibu Roswita Asti Kulla untuk datang berkunjung kekampung watukarere untuk melihat kegiatan tenun ikat yang kami lakukan, dan pada saat itu ibu mentri pariwisata memberikan kami bantuan tambahan untuk membeli bahan/peralatan yang diperlukan dan pada saat itu juga bantuan yang diberikan berupa uang tunai langsung di bagikan kepada kami setiap rumah yang tinggal didalam kampung maupun di luar kampung watukarere. Yang berikutnya juga adik dengan adanya kerja sama yang baik antara ketua yayasan EGK dan Hotel Nihi Sumba, dari pihak shef hotel suda 2 kali mereka datang di kampung watukarere untuk melatih kami cara memasak dan mengolah makanan khas lokal sumba atau makanan tradisional supaya mempunyai nilai jual dan bisa dijual kalau ada tamu yang datang. (Wawancara pada hari selasa 1 juli 2025)

Menurut yang disampaikan oleh ibu Nona Rhut Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa beliau menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan atau berperan aktif masyarakat dalam strategi pengembangan/pelaksanaan program kampung pariwisata. Dalam hal ini masyarakat memiliki semangat dan gotong-royonh yang tinggi dengan adanya program yang mereka jalankan atas kersama yang baik antara EGK (engglis go to kampung) untuk bagaimana mereka terus menghidupkan dan terus melindungi potensi yang mereka miliki, adapun penyampaian ibu nona rhut pada saat melakukan wawancara, penyampiannya sedikit ada perbedaan dari hasil wawancara

sebelumnya untuk bagaimana keterlibatan aktif pemerintah desa setempat dalam mengembangkan potensi yang ada dan program yang masyarakat sudah jalankan. Peneliti dapat menilai bahwa pemerintah desa Watukarere belum peka atau masih minimnya strategi-strategi dalam hal pengembangan desa wisata atas kegiatan yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Soleman Hoga selaku pelaku utama/bagian dari pengelola kampung pariwisata yang berkaitan dengan perencanaan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata, sebagai berikut:

Baik adik, kalau soal perencanaan pemerintah desa dalam pengembangan potensi pariwisata dan pemanfaatannya, saya selaku pelaku utama atau yang bagian dari kelompok pengelolaan kampung pariwisata beranggapan bahwa, pemerintah desa nya belum ada sama sekali perencanaan atau tindakan yang dilakukan atau pro terhadap kami masyarakat yang telah mengelolanya. Kemudian disisi lainnya kami sangat mengharapkan keterlibatan langsung pemerintah desa dalam memberikan bantuan atau sponsor Dana sehingga kami bisa maksimal dalam pengembangan program kampung pariwisata serta kelompok Tenun Ikat Karaja Laboya. (Wawancara pada Rabu 3 Juli 2025)

Dari hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh Soleman Hoga selaku bagian dari pengelola kampung pariwisata, peneliti menyimpulkan bahwa dalam perencanaan pemerintah desa dalam melihat atau mengambil tindakan dan rencana atas program yang dijalankan masyarakat setempat masih belum adanya keterlibatan langsung pemerintah setempat dan sangat

tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat dalam hal pengembangan desa wisata ataupun dalam memberikan solusi yang diharapkan oleh masyarakat, namun pemerintahnya berdiam diri seolah tidak mengetahui apa yang telah dijalankan oleh masyarakat. Sehingga kemudian peneliti beranggapan bahwa memang masih kurangnya partisipasi aktif pemerintah desa watukarere dalam pengembangan kampung pariwisata serta dalam pengembangan Tenun Ikat Karaja Laboya yang dilakukan oleh ibu-ibu dikampung watukarere.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber diatas yang telah disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh bangunan di Kampung Situs Watukarere diwajibkan menggunakan atap dari bahan alami, yaitu alang-alang, sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan estetika arsitektur tradisional Sumba, menggantikan penggunaan atap seng. Sementara itu, pembangunan fasilitas umum seperti kamar mandi/WC, penerangan listrik, dan akses air bersih sebagian besar didukung oleh bantuan eksternal, terutama dari lembaga EGK (English Go to Kampung) dan Hotel Nihi Sumba, melainkan bukan dari alokasi Dana Desa.

Di kampung ini juga tersedia pos jaga yang berfungsi untuk mencatat kunjungan wisatawan sebagai bagian dari sistem keamanan dan pendataan. Salah satu kekuatan utama kampung adalah produk tenun ikat tradisional Karaja Laboya yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu, di mana hasil tenunan dijual langsung kepada pengunjung dan memberikan manfaat ekonomi yang

nyata. Proses produksi ini turut didukung oleh EGK melalui penyediaan modal awal, dengan bahan dasar tenun berasal dari kapas hutan dan pewarna alami.

Pemerintah desa sendiri telah menunjukkan dukungan dalam bentuk kehadiran dan arahan moral, namun belum berkontribusi secara langsung dalam bentuk pendanaan atau program terstruktur. Sehingga proses pembangunan di kampung ini masih dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Masyarakat berharap ke depan ada peran yang lebih nyata dari pemerintah desa, khususnya dalam hal pendanaan, perencanaan program, dan dukungan terhadap sektor pariwisata dan kelompok pengrajin tenun ikat. Secara umum, program kampung wisata ini telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dari kunjungan wisatawan dan penjualan produk lokal. Selain itu, pelatihan memasak dari chef Hotel Nihi Sumba juga turut meningkatkan keterampilan warga dalam mengembangkan kuliner lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Dengan demikian, program pengembangan Kampung Wisata Kampung Watukarere menjadi bukti bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dan kerja Sama yang baik dengan pihak luar mampu membawa perubahan yang positif, meskipun dukungan dari pemerintah desa masih terbatas. Untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan program ini, dibutuhkan komitmen

lebih besar dan peran aktif dari pemerintah desa, terutama dalam aspek perencanaan, pendanaan, dan pengelolaan jangka pendek dan panjang.

## **B. Cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa**

### **Watukarere**

Pemerintah Desa Watukarere dalam Cara pengembangan Desa Wisata harus maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengatasi sebagaimana mestinya Desa Watukarere bisa sejahtera melalui program Desa Wisata dan mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti program-program yang suda berjalan sampai saat ini di Desa Watukarere tepatnya dikampung situs watukarere. Dalam pengembangan dan membangun Desa Wisata tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah Desa Watukarere sebagai kepala wilayah setempat untuk mengayomi/mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun, pemberdayaan, dan mewujudkan kebijakan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi bagaimana cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere dengan mewawancarai bapak Alexsander Laiya Kulla selaku kepala Dusun 1 kampung watukarere dan akan menjelaskan bagaimana cara pemerintah Desa dalam membangun program dan mendistribusi bantuan kepada masyarakat setempat. Dengan demikian dalam jawaban yang disampaikan sebagai berikut:

Baik adik, jadi khusus didusun kami dusun 1 watukarere sebagai kampung situs pariwisata dan kami sebagai pemerintah desa sangat mendukung sekali, jadi yang pertama adik kami mengadakan sosialisasi terkait kampung pariwisata kemasayarakat. Lalu yang kedua adik dari segi pelayanan pemerintah setempat terhadap kampung pariwisata sangat mendukung melalui pembangunan dengan mendirikan post jaga dipintu masuk serta secara pemikiran dan dukungan tenaga. Namun kalau secara material jujur saja adik memang belum ada yang dibantu oleh pemerintah desa, memang ini ada pembanguna WC/kamar mandi tetapi yang dibantu oleh EGK (tenun ikat karaja laboya). Kalau soal kesepakatan awal dalam menjalankan program ini adik memang atas kesepakatan bersama dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Cuma adik yang menjadi kendala kami sebagai pemerintah maupun masyarakat terkait kampung pariwisata ini secara aturan SK nya belum ada kami terima dari kabupaten namun kalau secara perijinan atau atas dasar pengetahuan pemerintah kabupaten itu di akui bahwa kampung watukarere adalah kampung pariwisata, jadi begitu adik. Terus yang kemudian adik kami sebagai pengelola di kampung tersebut adik, kami membuat struktur organisasi sementara untuk lebih teratur dalam penerimaan tamu dan uang masuknya kami musawarahkan sebagai masyarakat setempat untuk sepakat yang kemudiannya nanti menggunakan dalam penataan kampung lebih lanjut adik. (Wawancara rabu 2 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disampaikan bapak Alexander L. kulla maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kampung situs kampung watukarere, pemerintah setempat dapat mempermudah masyarakat dalam perekonomian, adapun pariwisata tersebut tidak hanya keindahan dalam penataan kampung dan rumah adat yang menjulang tinggi tetapi pemerintah desa dapat bekerja sama dengan EGK (Englihs go to kampung). Salah satu kegiatannya yang dilaksanakan adalah program tenun ikat karaja laboya yang dimana para ibu-ibu atau masyarakat setempat melakukan proses penenunan dan kemudian hasil dari



tenun tersebut dapat dijual kepada pihak terkait seperti wisatawan, pemerintah, maupun masyarakat lokal pada umumnya. Dengan adanya program tersebut sejauh ini masyarakat sangat antusias dalam melakukannya bersama pemerintah desa dan pihak terkait seperti EGK yang dimana para ibu-ibu dapat mempermudah dan meningkatkan perekonomian mereka sehingga dalam pendapatan mereka tidak hanya dari hasil pertanian. Dengan hasil tersebut masyarakat dapat menggunakan dengan baik tanpa pungutan dari pemerintah desa maupun EGK (Englisgo tu kampung). Dari fenomena tersebut pemerintah setempat dapat mendorong atau mendukung penuh perekonomian masyarakat lewat program yang sudah dijalankan dengan pendapatan sebelumnya jauh berbanding dengan adanya program pariwisata dan tenun ikat.

Sehingga dengan adanya program yang telah dijalankan oleh masyarakat pemerintah dapat mendorong dan berperan aktif dalam memberikan bantuan, dukungan untuk melancarkan program yang ada sehingga tidak sekedar wacana/pereencanaan belaka yang disampaikan oleh pemerintah desa watukarere namun dapat memberikan bukti nyata dilapangan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Bernadeta B. Tara selaku ketua Tenun Ikat Karaja Laboya di Kampung Watukarere terkait bagaimana cara pemerintah Desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam merancang dan menjalankan program strategi pengembangan Desa Wisata dan hambatan yang signifikan bagi pemerintah

desa dalam menyediakan/mendistribusikan bantuan kepada pengelola kampung pariwisata serta tenun ikat di Kampung Watukarere, dengan jawaban berbagai penjelasan yang disampaikan sebagai berikut:

Baik adik, hambatan atau kelemahan kami sebagai masyarakat karena memang belum ada bantuan yang diserahkan oleh pemerintah desa, pada tahap pembukaan program ini berjalan adik memang kepala desanya beliau menyampaikan sendiri untuk siap membantu menyumbangkan benang untuk modal awal dalam tenun ikat bagi ibu-ibu. Namun sampai saat ini belum ada sama sekali yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri adik. Lalu yang berikut adik dalam proses tenun ikat kami menggunakan pewarnanya dari kulit kayu pilihan, misalnya kalau warna merah kami ambil dari kulit kayu mahoni, kessi, asam, dan pohon kesambi. Terus kalau warna kuning kita ambil dari kulit kayu taramanu, lalu kalau warna biru sama hitam bahan pewarnanya dari daun wora yang tumbu dipadang, setelah dapat bahannya adik kita memulai gulung benang lalu kita hamane untuk buat bentuk dan motifnya adik lalu setelah jadi baru kita celup di warna mana yang kita sukai dengan cara, bahannya di masak menggunakan air dan bara api. (Wawancara pada hari rabu 2 juli 2025).

Dari hasil wawancara diatas yang telah disampaikan oleh ibu Bernadeta B. Tara peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya, bahwa dalam cara pemerintah desa dalam rangka pengembangan kampung pariwisata belum ada yang dilakukan terkait program kampung pariwisata dan tenun ikat sebagai pendorong keramaian kampung pariwisata. Lalu yang berikut dampak dari program ini yang suda berjalan hampir satu tahun sangat membantu dalam segi peningkatan perekonomian masyarakat dimana dalam pengelolaan pada umumnya masyarakat kampung watukarere menekuni tenun ikat sehingga hasilnya yang cukup baik dengan pendapatan mereka yang sangat membantu. Lalu yang kemudian dengan adanya bantuan-bantuan atas kerja

Sama EGK dan pihak-pihak terkait sehingga bantuan selalu berdatangan seperti bantuan WC yang diberikan oleh Pendeta Ham dari Korea.

Dalam hal ini pemerintah desa watukarere sangat diprihatinkan bahwa belum adanya langkah nyata dalam memberikan bantuan/program secara khusus yang disalurkan kemasyarakat sebagai kepala wilayah setempat, yang dimana ini adalah tugas pemerintah desa watukarere yang lebih berperan dalam segi pembangunan atau pengembangan desa wisata yang berada tepat didesa watukarere yang sekarang sedang dikelola oleh masyarakat setempat. Dan yang kemudian, sesuai yang telah diamati oleh peneliti bahwa itu benar adanya yang dimana pemerintah setempatnya tidak mempunyai konsistensi terhadap program-program yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Martha selaku masyarakat serta bagian dari anggota Tenun Ikat Karaja Laboya yang berkaitan dengan cara pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata, sebagai berikut:

“Baik adik kalau mengenai cara pemerintah desa setempat adik itu tidak ada sama sekali dorongan atau campuran tangan dalam program Tenun Ikat yang kami laksanakan melainkan dukungan penuh serta pemodalan dari EGK (engglis go to kampung) yang bertanggung jawab sepenuhnya. Dengan adanya program ini yang berjalan adik kami sebagai ibu-ibu tenun ikat sangat membantu dalam segi perekonomian yang dimana hasilnya bisa kami gunakan dalam kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak, kalau dalam waktu satu minggu itu kami bisa dapat satu lembar kain/sarung adik lalu dalam satu kelompok itu kami berjumlah 20 orang anggota dengan 3 kelompok, dalam satu minggu dua kali kegiatan persatu kelompok jadi dalam satu minggu atau satu bulan itu kami dapat 20/25 lembar kain sama sarung. Kemudian dalam

penjualan hasil tenunnya adik kami bergantung dengan tamu yang datang berkunjung dikampung pariwisata, kemudian system penjualannya dengan harga yang berbeda-beda, kalau tamu manca Negara diharga 1 juta kemudian kalau di orang lokal/sekitar 7/8 ratus ribu adik. (Wawancara senin 14 juli 2025)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh ibu Martha dengan cara pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh ibu Bernadeta B. Tara dengan yang disampaikan oleh ibu Martha hampir sama penyampaian namun ada sedikit perbedan dalam penyampaian. Yang dimana pemerintah desa tidak adanya partisipasi atau dukungan aktif dalam program yang dijalankan oleh masyarakat setempat, melainkan dari lembaga-lembaga lainnya seperti EGK yang turut berperan aktif dalam memberikan bantuan dan solusi dalam menjalankan sebuah program kampung pariwisata dan tenun ikat yang telah dijalankan.

Sehingga dalam hal ini peneliti dapat berargumen atau menganalisis bahwa sama seperti yang telah saya katakan disetiap kutipan yang dimana pemerintah desa watukarere belum mempunyai langkah strategis atau kebijakan yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa pemerintah desa masi berdiam diri seolah tidak mau mengambil bagian dalam pengelolaan Kampung Pariwisata dan Tenun Ikat Karaja Laboya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas yang telah disampaikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa diDusun satu Kampung Watukarere yang telah dijadikan sebagai kampung pariwisata,

memperlihatkan adanya potensi wisata yang strategis namun kurangnya keterlibatan pemerintah desa dalam menjaga serta melestarikan budaya lokal, khususnya melalui kegiatan Tenun Ikat. Selain itu, pengelolaan potensi wisata alam yang letaknya dekat dengan pantai dan hotel turut menjadi perhatian bersama. Namun pemerintah desa hanya memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi, kontribusi tenaga, serta pemikiran, dalam pengelolaan kampung pariwisata termasuk dalam pembuatan pos penjagaan di pintu masuk kampung. Namun, bentuk dukungan berupa bantuan material dari pemerintah desa masih sangat terbatas dan belum terealisasi, termasuk janji pemberian benang untuk kegiatan tenun yang hingga kini belum dipenuhi.

Walau demikian, masyarakat dan pemerintah desa sejak awal telah memiliki kesepakatan bersama untuk menjalankan program ini secara mandiri. Hingga saat ini. Untuk menunjang kelancaran kegiatan, masyarakat telah membentuk struktur organisasi pengelola sementara yang bertugas mengatur penerimaan tamu dan pengelolaan dana masuk, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penataan kampung secara bertahap.

Tenun ikat Karaja Laboya menjadi kegiatan unggulan sekaligus penggerak roda ekonomi lokal, yang digerakkan oleh ibu-ibu dalam tiga kelompok beranggotakan total sekitar 20 orang. Proses pewarnaan benang dilakukan secara tradisional menggunakan bahan alami dari kulit kayu dan daun-daunan. Dalam satu minggu, satu kelompok mampu menyelesaikan

satu lembar kain atau sarung, sehingga secara keseluruhan bisa dihasilkan sekitar 20 hingga 25 lembar per bulan.

Hasil tenunan tersebut dijual langsung kepada para wisatawan yang berkunjung ke kampung, dengan harga yang bervariasi: sekitar Rp700.000–Rp800.000 untuk pengunjung lokal, dan mencapai Rp1.000.000 untuk wisatawan mancanegara. Seluruh kegiatan tenun ini mendapatkan dukungan penuh dari organisasi EGK (English Go to Kampung), yang memberikan modal awal dan berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Program kampung pariwisata dan kegiatan tenun ikat yang berjalan di Dusun satu Dampung Watukarere telah memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya bagi para ibu rumah tangga. Meskipun demikian, perhatian dari pemerintah desa masih dirasakan kurang, terutama dalam bentuk program atau bantuan langsung. Oleh karena itu, masyarakat berharap ke depannya pemerintah desa bisa lebih aktif dan berkontribusi secara nyata demi mendukung keberlanjutan serta pengembangan kampung pariwisata di Kampung Watukarere.

### **C. Tindakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

Tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata adalah bagian dari pembangunan masyarakat yang dimaknai sebagai usaha pengembangan, kemandirian, dan memberikan dorongan maupun motivasi

untuk memperkuat posisi strategi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan dan pengembangan merupakan usaha memberikan kemampuan atau keberdayaan untuk membangun potensi dan kompetensi masyarakat agar lebih kreatif dan menemukan hal-hal baru dalam lingkungan berdesa termasuk bidang ekonomi, politik, dan kehidupan sosial budaya.

Dengan demikian Desa Watukarere dalam proses pengembangan sebagai Desa Wisata yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga Desa Watukarere untuk ikut berpartisipasi, melestarikan, menghidupkan, dan mengembangkan potensi pariwisata yang telah dibangun dengan memanfaatkan potensi sebagai pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan proses dan pola yang bersifat horizontal baik dalam internal pemerintah Desa, antara kelompok masyarakat, dan stakeholders.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi dengan mewawancarai bapak Poro Bili selaku tokoh masyarakat untuk menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan daya tarik pariwisata supaya tetap meningkat dan menjalin kerjasama antara pemerintah dan pengelola Kampung Pariwisata, dan bagaimana tindakan pemerintah Desa dalam melihat program Kampung Pariwisata yang telah dijalankan oleh masyarakat setempat, sebagai berikut:

Baik adik, kalau mengenai tindakan pemerintah desa upaya pengembangan dan meningkatkan daya Tarik kampung pariwisata, tindakan secara memberikan kebijakan yang konkrit memang belum ada yang bisa kami saksikan namun kalau secara mendukung pemerintah sangat mendukung dan searah apa yang diarahkan oleh

pemerintah desa dalam kami menjaga kenyamanan kampung pariwisata, melalui kebersihan lingkungannya, cara menerima tamu yang ramah dengan menunjukan sebuah antraksi budaya. Kemudian tindakan pemerintah desa adik dalam mereka merespon/melihat program yang kami suda jalankan, memang belum adanya bantuan-bantuan secara khusus melalui material ataupun bantuan-bantuan lainnya, namun kalau secara pemikiran dan tenaga adik mereka ada dengan memberikan melalui support dan mendukung kami. Kerena setahu kami sebagai masyarakat adik, kami tahunya bahwa Anggaran Dana Desa (ADD) itu tidak muda juga untuk pemerintah desa langsung memberikan kami anggarannya adik, karena harus melalui pos-posnya juga dalam mengurus yang berkaitan dengan administrasi jadi kami hanya terus mengembangkan program yang sudah berjalan sambil kami menunggu partisipasi atau peran aktif pemerintah desa watukarere. Yang walaupun pemerintah desa juga adik berniat atau mencari solusinya untuk memberikan bantuan anggaran dalam program kampung pariwisata yang kami jalankan tetapi pemerintah desa dilemah dengan urusan administrasi yang tidak mudah untuk langsung memberikan bantuan begitu saja adik. (Wawancara rabu 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah disampaikan oleh bapak Poro Bili peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindakan dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya Tarik Pariwisata dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat pada pembangunan fisik dan penambahan fasilitas pendukung untuk mendukung jalannya Desa Wisata khususnya dibidang Pariwisata secara program atau kebijakan belum ada yang diberikan oleh pemerintah desa setempat. Artinya dalam pengelolaan dan peningkatan maupun kerjasama pemerintah antara masyarakat saling mendukung dalam program yang suda berjalan, ditamba dengan adanya kersama yang baik antara EGK sangat membantu dalam kelancaran



program pariwisata yang sudah dijalankan oleh masyarakat, dengan demikian pemerintah Desa selalu mendorong dan mendukung dalam kenyamanan Kampung Pariwisata melalui kebersihan lingkungan, kenyamanan para tamu pengunjung, cara penerimaan tamu yang ramah, maupun dalam tindakan pemerintah Desa dalam menjaga dan melindungi potensi pariwisata yang dimiliki Desa Watukarere dengan cara memberikan akses yang terbaik semaksimal mungkin, melalui kebersihan jalan agar tidak rusak yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan masyarakat maupun para tamu yang berkunjung dikampung pariwisata, dengan akses air bersih yang sudah masuk dalam kampung pariwisata atas kerja sama Sumba Fondation (SF) yang bagian dari Hotel Nihi Sumba atas kerja sama atau perijinan pemerintah Desa Watukarere untuk lebih mudah dalam mengakses air bersih.

Pemerintah Desa Watukarere dalam meningkatkan atau mengembangkan potensi yang ada, pemerintah terus berusaha dengan memberikan edukasi yang tepat bagi masyarakat agar program itu tetap berkelanjutan dimasa depan dan juga bagaimana dalam sama-sama melindungi Kampung Pariwisata agar tetap terjaga dalam segi kebersihan lingkungan sekitar dan terus meningkatkan potensi yang ada. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengedukasi proses pembangunan Desa Wisata/Kampung Pariwisata yang berkelanjutan bahwa kehadiran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan Desa Wisata menjadi poin utama. Sejalan itu, pengembangan sumber daya manusia

yang berpusat pada masyarakat dapat menjangkau area yang lebih luas bukan hanya membentuk masyarakat terampil dan kualitas sesuai dengan kebutuhan agar masyarakat yang sebelumnya tidak mampu memberikan kontribusinya dalam pembangunan Desa tetapi ada pengembangan dan peningkatan potensi masyarakat yang menekankan pentingnya “pemberdayaan dan pengembangan” untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki secara kontekstual. Yang artinya ketika pemerintah Desa dan program strategi yang didukung oleh pemerintah Desa lepas tangan dan tidak lagi berjalan, maka masyarakat harus mampu berjalan secara mandiri serta memiliki kreatifitas dan inovatif.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yusup Baiya selaku pelaku utama serta bagian dari struktur organisasi dalam pengembangan kampung pariwisata di Desa Watukarere, dalam hal tindakan pemerintah setempat dalam pengembangan Desa Wisata/Kampung Pariwisata sehingga dalam hal ini dalam wawancara beliau menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Watukarere sebagai berikut:

Baik adik, dalam tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan kampung pariwisata memang belum ada yang menurut kami itu adalah tindakan pemerintah setempat yang serius dalam program yang suda kami jalani selama ini adik, memang suda ada yang dibangun yaitu pembuatan pos-pos jaga tepatnya dipintu masuk kampung dan yang lainnya disekitaran kampung. Namun itu semua bagian dari antusias masyarakat setempat dalam pembangunan pos-pos strategi dan biayayanya ditanggung sendiri oleh masyarakat setempat, lalu yang kemudian kepala desa/pemerintah desanya hanya sekedar mengetahui bahwa ada pembangunan yang di bangun oleh masyarakat setempat.

Lalu untuk akses jalannya adik karena suda ada memang baik itu jalan kabupaten dan jalan usaha tani yang langsung menuju dikampung pariwisata dan langsung turun kepantainya, pemerintah desa tetap memperhatikan dalam menjaga jalannya agar tidak rusak dan nyaman di lintasi oleh masyarakat dan pengunjung kampung pariwisata, dengan cara pemerintah desa mengajak dan membuat peraturan bahwa di setiap jari jomad diadakan kerja bakti atau gotong-royong oleh masyarakat pada umumnya didesa watukarere dan terlebih khususnya masyarakat dalam kampung pariwisata. (Wawancara senin 14 juli 2025).

Dari hasil wawancara bersama Yusup Baiya yang berkaitan dengan tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata beliau menyampaikan bahwa perencanaan pemerintah setempat terkait dalam pengembangan/pembangunan kampung pariwisata belum ada yang direncanakan oleh pemerintah desa watukarere secara konsisten atau berperan aktif dalam pembangunan/penataan lebih lanjut terkait program kampung pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat setempat, melainkan antusias para pengelola kampung pariwisata serta masyarakat setempat pada umumnya yang membangun kerjasama yang baik sehingga pembangunan yang suda ada seperti pos jaga dan cara penerimaan tamu dan pengelolaan lainnya mereka sepakati semua elemen masyarakat atas dasar kerjasama.

Sehingga kemudian peneliti dapat menganalisis bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam tindakan untuk melihat program yang suda dijalankan masi minimnya respon baik atau keteterlibatan langsung oleh pemerintah, sehingga masyarakat sangat mengharapkan peran aktif

pemerintah setempat dalam pengembangan kampung pariwisata yang ada di Desa Watukarere.

Kemudian peneliti melakukan lanjutan wawancara dengan Matius M. Bulu selaku masyarakat, dalam hal tindakan pemerintah setempat dalam pengembangan Desa Wisata/Kampung Pariwisata sehingga dalam hal ini dalam wawancara beliau menyampaikan sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Watukarere sebagai berikut:

Baik adik, dalam tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan kampung pariwisata memang belum ada yang menurut kami itu adalah tindakan pemerintah setempat yang serius dalam program yang suda kami jalani selama ini adik, memang suda ada yang dibangun yaitu pembuatan pos-pos jaga tepatnya dipintu masuk kampung dan yang lainnya disekitaran kampung. Namun itu semua bagian dari antusias/kekompakan masyarakat setempat dalam pembangunan pos-pos strategi dan biayayanya ditanggung sendiri oleh masyarakat setempat, lalu yang kemudian kepala desa/pemerintah desanya hanya sekedar mengetahui bahwa ada pembangunan yang di bangun oleh masyarakat setempat. Lalu untuk akses jalannya adik karena suda ada memang baik itu jalan kabupaten dan jalan usaha tani yang langsung menuju dikampung pariwisata dan langsung turun kepantainya, pemerintah desa tetap memperhatikan dalam menjaga jalannya agar tidak rusak dan nyaman di lintasi oleh masyarakat dan pengunjung kampung pariwisata, dengan cara pemerintah desa mengajak dan membuat peraturan bahwa di setiap jari jumad diadakan kerja bakti atau gotong-royong oleh masyarakat pada umumnya didesa watukarere dan terlebih khususnya masyarakat dalam kampung pariwisata. (Wawancara senin 14 juli 2025).

Dari hasil wawancara bersama Matius M. Bulu yang berkaitan dengan tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata hal yang sama juga apa yang telah disampaikan oleh Yusup Baiya diwawancara

sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang telah disampaikan oleh Matius M. Bulu yang berkaitan dengan tindakan pemerintah setempat terkait dalam pengembangan/pembangunan kampung pariwisata belum ada yang direncanakan/tindakan oleh pemerintah desa watukarere secara konsisten dalam pembangunan/penataan lebih lanjut terkait program kampung pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat setempat, melainkan antusias para pengelola kampung pariwisata serta masyarakat setempat pada umumnya yang membangun kerjasama yang baik sehingga pembangunan fisik yang sudah ada seperti pos jaga dan cara penerimaan tamu dan pengelolaan lainnya mereka sepakati atas dasar kerjasama.

Keaktifan pemerintah desa watukarere dalam pengembangan/pengelolaan potensi wisata sangat diharapkan sehingga dengan adanya peran pemerintah yang cukup intensif maka dapat dengan maksimal organisasi atau lembaga kampung pariwisata dapat meningkat dan berkelanjutan dimasa depan. Dalam pengembangan desa wisata secara langsung akan tercapai secara mendasar ketika peran pemerintah dan terus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa wisata/kampung pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat baik secara sumber daya maupun sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas yang telah disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa Pengembangan Kampung

Pariwisata di Dusun satu kampung Watukarere mencerminkan kuatnya semangat kolaborasi dan gotong royong masyarakat setempat. Masyarakat berperan aktif dalam menciptakan kenyamanan lingkungan wisata, baik melalui upaya menjaga kebersihan, memberikan sambutan yang hangat kepada pengunjung, maupun menampilkan atraksi budaya sebagai salah satu magnet utama bagi wisatawan.

Namun, dukungan konkret dari pemerintah desa dalam bentuk materi atau program khusus masih sangat terbatas. Penyaluran anggaran langsung untuk kegiatan pariwisata belum bisa dilakukan karena terkendala oleh mekanisme birokrasi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). Hambatan administratif ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peran pemerintah desa secara lebih aktif. Meski demikian, masyarakat tetap berinisiatif untuk melanjutkan program secara mandiri sembari menantikan dukungan nyata dari pihak pemerintah desa.

Terkait pembangunan fisik seperti pos jaga di pintu masuk kampung, seluruh pembiayaan berasal dari swadaya masyarakat, sementara pemerintah desa hanya mengetahui adanya pembangunan tersebut tanpa keterlibatan langsung. Di sisi lain, pemerintah desa masih menunjukkan kepedulian terhadap infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju kawasan wisata, salah satunya melalui kebijakan gotong royong pembersihan rutin setiap hari Jumat yang melibatkan masyarakat, khususnya warga kampung watukarere.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Perencanaan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

Perencanaan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Dalam perencanaannya, pemerintah mempunyai konsep strategis dalam pengembangan desa wisata sehingga programnya terstruktur dan sesuai yang telah dijalankan oleh masyarakat, pemerintah dapat mengoptimalkan pengembangan potensi tersebut melalui perencanaan yang strategis. Pada tahap ini, pemerintah desa perlu mengkaji berbagai aspek seperti sumber daya alam, budaya, dan fasilitas infrastruktur yang berperan dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Selain itu, pemerintah desa membuat perencanaan penetapan yang mencakup pengembangan, pengaturan anggaran, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung proses pengembangan desa wisata. Dalam proses perencanaannya melibatkan keterlibatan masyarakat agar program yang dirancang dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Namun dari uraian diatas belum ada yang terlaksana dilakukan oleh pemerintah desa sehingga peneliti dapat menganalisis/menyimpulkan bahwa pemerintah desa masih minimnya tata kelola perencanaan atau strategi dalam pengembangan desa wisata, sehingga sinkron apa yang telah

peneliti mengamati sejak mengadakan wawancara terhadap setiap narasumber dibab sebelumnya.

## **2. Cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

Cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere dusun satu Kampung Watukarere sebagai kampung pariwisata memperlihatkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan warga dalam menjaga budaya lokal, khususnya melalui pariwisata dan tenun ikat. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk tenaga, serta pembangunan pos jaga, namun dukungan berupa bantuan material masih sangat minim. Sehingga yang kemudian masyarakat membuat struktur organisasi pengelola kampung pariwisata untuk mengelola penerimaan tamu dan pendapatan. Juga tseun ikat Karaja Laboya menjadi sumber pendapatan utama yang didukung oleh EGK melalui modal awal dan program pemberdayaan masyarakat. Program ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi ibu-ibu, walaupun dukungan dari pemerintah desa masih terbatas. Namun masyarakat tetap berharap pemerintah desa dapat lebih proaktif dan memberikan kontribusi nyata demi kelangsungan dan pengembangan kampung pariwisata.

## **3. Tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

Tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata memberikan langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait



pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh masyarakat setempat, seperti pembangunan fasilitas pendukung wisata seperti akses jalan, area parkir, dan sarana informasi, pengelolaan tata kelola wisata, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus mengambil tindakan juga berperan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengelolaan kampung pariwisata, termasuk pengembangan produk lokal seperti tenun ikat karaja laboya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui sektor pariwisata, namun dukungan materi dan program strategis dari pemerintah Desa masih terbatas karena kendala birokrasi dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga dari hasil pengamatan/hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya tindakan yang signifikan atau proaktif dalam pengembangan kampung wisata, sehingga kemudian masyarakat tetap aktif dalam menjaga kenyamanan lingkungan wisata melalui kebersihan, sambutan ramah, serta atraksi budaya, dan masyarakat tetap menjalankan program secara mandiri sambil menunggu dukungan lebih nyata dari pemerintah Desa setempat. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik seperti pos jaga dibiayai oleh masyarakat melalui kumpul iuran perKK, sehingga kemudian walau belum ada tindakan/perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah Desa, tetapi inisiatif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan kampung pariwisata yang berkelanjutan dimasa depan. Dan yang kemudian diharapkan tindakan

pemerintah Desa dapat lebih aktif dan terencana dalam mendukung pengembangan kampung pariwisata ke depannya.

## **B. Saran**

### **1. Perencanaan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

- a. Pemerintah desa watukarere dalam perencanaan program dan pelaksanaan program desa wisata harus menjadi ujung tombak dan melibatkan seluruh elemen lapisan masyarakat dan menentukan baik buruknya program atas kegiatan yang dilakukan, maka tujuan pembangunan desa wisata juga dapat maksimal dan berkelanjutan dimasa depan.
- b. Membuka ruang bagi seluruh masyarakat yang tidak mempunyai usaha mandiri (inklusif) dan harus mampu mengayomi masyarakat dalam memberikan pembinaan/pelatihan sehingga yang bergabung dalam lembaga-lembaga desa wisata mempunyai skil dalam pengembangan atau pemanfaatan potensi yang dimilikinya.
- c. Mengembangkan dan mengelola desa wisata yang lebih inovatif dan kreatif, daya Tarik wisata, serta membangun pariwisata dengan daya nilai-nilai jual budaya lokal maupun produk lokal hasil karya, seperti tenun ikat dan UMKM desa watukarere.

## **2. Cara pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

- a. Pemerintah desa watukarere perlu memaksimalkan kelembagaan organisasi pengurus kampung pariwisata hingga seni dan budaya dengan membangun komunikasi dialogis atau kerja sama yang lebih intens untuk menciptakan stabilisasi organisasi, keberdayaan dan dapat berkolaboratif untuk menjaga nilai-nilai budaya dan keharmonisan lingkungan.
- b. Memaksimalkan peran pengelola kelompok wisata dalam pengelolaan dan pengembangan sentral pariwisata dan meningkatkan potensi keanggotaan, membangun komunikasi dengan anggota kelompok wisata dan anggota kelompok tenun ikat.
- c. Pemerintah desa harus menjalankan pembinaan pada desa wisata atau pengelola desa wisata dengan tujuan organisasi yang dimana keselarasan program yang dilakukan harus tepat dan berbanding lurus hingga tugas, dan fungsinya serta tujuan nya dapat berjalan maksimal.

## **3. Tindakan pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

- a. Pemerintah desa watukarere perlu memperluas sasaran pasar hasil produk tenun ikat dan UMKM lainnya di desa watukarere dan

mengupayakan izin edar produk-produk seperti tenun ikat dengan kualitas baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

- b. Tindakan pemerintah desa watukarere dalam menyelenggarakan urusan desa dan dalam melaksanakan program desa wisata dapat membuat peraturan desa wisata untuk memproteksi kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa lebih khususnya pada program strategi pengembangan desa wisata di desa watukarere.
- c. Tindakan pemerintah desa watukarere dalam meningkatkan pemberdayaan dan potensi masyarakat yang dimana basis penyelenggaraan atau pengembangan desa wisata adalah masyarakat desa watukarere itu sendiri agar terberdaya dan mampu membangun potensi atau pengetahuannya.
- d. Pemerintah Daerah/kabupaten dalam proses perencanaan dan pengembangan atau pelaksanaan program desa wisata perlu memperhatikan kewenangan pemerintah desa, sehingga tidak memaknai desa adalah sebagai kepanjangan tangan, melaksanakan tugas, dan institusi pemerintahan terkecil/desa secara penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliya, Amanda Wulan, And Endang Indartuti. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Perkembangkan Desa Wisata Di Desa Hendrosari Kab. Gresik." *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (E-Issn: 2797-0469) 2.05 (2022): 28-37.
- Apriliya, A. W., & Indartuti, E. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Perkembangkan Desa Wisata Di Desa Hendrosari Kab. Gresik. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (E-Issn: 2797-0469), 2(05), 28-37.
- Hartati, Seri, Muhammad Fajar Anugerah, And Mhdtegar Yasri. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampung Wisata Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020." *Indonesian Journal Of Intellectual Publication* 2.2 (2022): 54-61.
- Hartati, S., Anugerah, M. F., & Yasri, M. T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampung Wisata Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 2(2), 54-61.
- Erbito, Y., & Ola, Y. (2024). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Cipta Karya. *Mount Hope Economic Global Journal*, 2(3), 138-144.
- Erbito, Yoseph, Et Al. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Cipta Karya. *Mount Hope Economic Global Journal*, 2024, 2.3: 138-144.
- Ristarnado, Ristarnado, Joko Settyoko, And Harpinsyah Harpinsyah. "Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 1.1 (2019): 40-51.
- Ristarnado, R., Settyoko, J., & Harpinsyah, H. (2019). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 40-51.
- Dewi, Susantri, Et Al. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Muntei Siberut Selatan Kepulauan Mentawai Sebagai Daya Tarik Wisatawan." *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata* 21.2 (2025): 65-74.

Dewi, S., Fero, D., Simbolon, R., Sitepu, Y., & Silalahi, W. (2025). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Muntei Siberut Selatan Kepulauan Mentawai Sebagai Daya Tarik Wisatawan. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 65-74.

## **LAMPIRAN**

### **PANDUAN WAWANCARA**

**Nama :**

**Jabatan :**

**Usia :**

**Tingkat pendidikan :**

#### **A. Perencanaan pemerintah Desa dalam strategi pengembangan Desa Wisata, diDesa Watukarere**

1. Apa saja perencanaan program-program utama yang dijalankan oleh pemerintah desa watukarere dalam strategi pengembangan desa wisata?
2. Bagaimana pemerintah Desa Watukarere melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam merancang dan menjalankan strategi pengembangan Desa Wisata?
3. Bagaimana upaya pemerintah Desa dalam melindungi potensi Desa Wisata diDesa Watukarere?
4. Bagaimana dampak keterbatasan anggaran pada kemampuan pemerintah Desa Watukarere dalam menjalankan program pengembangan Desa Wisata?
5. Dengan cara apa pemerintah setempat menilai efektivitas aktivitas pengembangan Wisata yang dijalankan oleh masyarakat dan mengukur dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat?

**B. Cara pemerintah Desa Watukarere dalam pengembangan Desa Wisata**

1. Dengan cara apa pemerintah Desa Watukarere menangani permasalahan infrastruktur, termasuk akses ke lokasi Wisata, fasilitas transportasi, dan pemasangan rambu-rambu jalan agar memudahkan masyarakat serta pengunjung?
2. Apa hambatan yang paling signifikan bagi pemerintah Desa Watukarere dalam menyediakan dan mendistribusikan bantuan kepada pengelola Wisata Kampung Watukarere?
3. Apa saja kendala yang ditemui pemerintah setempat dalam mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan lembaga donor?

**C. Tindakan pemerintah Desa Watukarere dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Watukarere**

1. Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Watukarere dalam pengembangan Wisata agar pengunjung wisatawan nyaman dan tetap ramai?
2. Bagaimana pemerintah Desa upaya peningkatan daya Tarik pariwisata tetap meningkat dan tetap menjalin kerja sama yang baik antara pengelola kampung wisata?
3. Bagaimana tindakan pemerintah Desa Watukarere dalam melihat program Kampung Wisata yang telah di jalankan oleh masyarakat setempat?



## DOKUMENTASI PENELITIAN



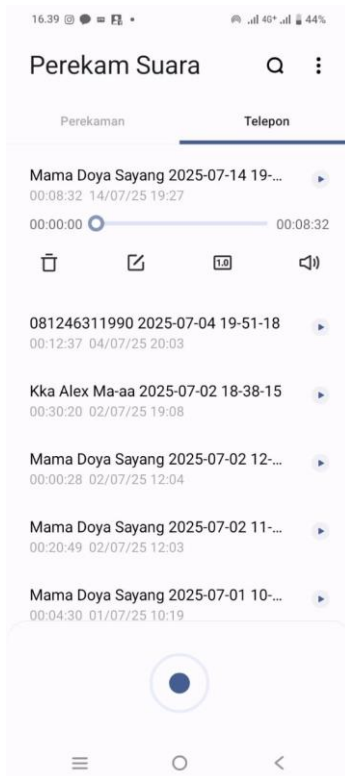
Wawancara peneliti dengan kepala desa watukarere, pada kamis 3 juli 2025



Wawancara dengan kepala dusun 1 watukarere, pada 2 juli 2025



Wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat, pada 2 juli 2025



Wawancara peneliti dengan ketua kelompok tenun, anggota kelompok pengelola kampung pariwisata, masyarakat umum, pada tanggal 1 dan 2 juli 2025



Wawancara peneliti dengan masyarakat, pada senin 14 juli 2025



Wawancara peneliti dengan informan, pada tanggal 1, 2, 4 juli 2025

## SURAT IJIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**Akreditasi Institusi B**

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SOKAL
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SOKAL

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

### SURAT TUGAS Nomor : 212/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Jekson Jewu Garra  
Nomor Mahasiswa : 21520039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT)  
b. Sasaran : Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembanagan Desa Wisata di Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT)  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Ketua



**Dr. Sutoro Eko Yunanto**  
NIP. 170 230 190

#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAKESKAL
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI: A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAJISTER, STATUS TERAKREDITASI BAKESKAL

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Ketua

*[Signature]*

Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NID. 170 230 190



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 24/PEM/J/V/2025

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Jekson Jewu Garra  
No. Mahasiswa : 21520039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul : 30 April 2025

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Ketua Program Studi

  
Dr. Gregorius Sahdan, M.A





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
KECAMATAN LAMBOYA  
DESA WATU KARERE**

Alamat : Tana Malli, Desa Watu Karere, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat  
Telp/ Hp : 082 146 020 971

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 291/53.12.12/2007/07-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANIS PAILA DIMA  
Jabatan : Kepala Desa Watu Karere  
Alamat : Allang-Desa Watu Karere

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JEKSON JEWU GARRA  
Nomor Mahasiswa : 21520039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul : Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT)  
Lokasi Penelitian : Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT)  
Lamanya : 25 Juni 2025 s/d 15 Juli 2025

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sehubungan dengan penyusunan skripsi "Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Tana Malli, 16 Juli 2025  
Kepala Desa Watu Karere

  
**YOHANIS PAILA DIMA**  
KECAMATAN LAMBOYA